

Katalog: 4102004.7406



# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 2019 KABUPATEN BOMBANA



BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BOMBANA





**INDIKATOR KESEJAHTERAAN  
RAKYAT 2019  
KABUPATEN BOMBANA**

## **INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BOMBANA 2019**

ISBN : 978-623-93817-8-3

Nomor Publikasi : 74060.2006

Katalog BPS : 4102004.7406

Ukuran Buku : 17,5 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : xvi + 106 halaman

Penyusun : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana

Gambar Kulit : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana

Diterbitkan Oleh : ©Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana

Dicetak Oleh : UD. Syahid, Kendari

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

## KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bombana 2019 memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan rakyat Kabupaten Bombana yang sumber data utamanya merupakan hasil pengumpulan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, taraf kesejahteraan dikaji menurut tujuh bidang yang mencakup Kependudukan, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, Konsumsi dan Pengeluaran, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Bombana. Data yang disajikan pada publikasi ini umumnya adalah angka persentase dari suatu populasi pada tingkat kabupaten.

Dengan terbitnya buku ini, diharapkan kebutuhan data indikator kesejahteraan rakyat sebagian besar sudah dapat dipenuhi. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan penerbitan publikasi yang akan datang sangat kami harapkan. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan dalam penyelesaian buku ini.

Rumbia, Agustus 2020  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Bombana

Hasyuril Hadini, S.E.  
NIP. 19670420 199212 1 001



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	xiii
I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Ruang Lingkup .....	3
1.4 Sumber Data .....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	4
II KEPENDUDUKAN.....	5
Konsep dan Definisi.....	7
2.1 Jumlah, Rasio Jenis Kelamin, dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	10
2.2 Rasio Ketergantungan.....	15
2.3 Status Perkawinan.....	20
III PENDIDIKAN.....	25
Konsep dan Definisi.....	27
3.1 Angka Melek Huruf.....	30
3.2 Status Pendidikan.....	32
3.3 Tingkat Partisipasi Sekolah.....	36
IV KESEHATAN.....	41
Konsep dan Definisi.....	43
4.1 Status Kesehatan Masyarakat .....	46
4.2 Akses Pelayanan Kesehatan.....	48
4.3 Perilaku Merokok.....	55

4.4	Kesehatan Ibu dan Anak.....	50
V	PERUMAHAN.....	59
	Konsep dan Definisi.....	61
	5.1 Kepemilikan Rumah.....	64
	5.2 Sumber Air.....	66
	5.3 Sanitasi.....	71
VI	KONSUMSI DAN PENGELUARAN.....	75
	Konsep dan Definisi.....	77
	6.1 Pengeluaran Rumah Tangga.....	79
	6.2 Konsumsi Kalori dan Protein.....	87
VII	SOSIAL LAINNYA.....	89
	Konsep dan Definisi.....	91
	7.1 Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	93
	7.2 Program Perlindungan Sosial.....	99
	7.3 Kepemilikan Aset Oleh Rumah Tangga.....	101
	DAFTAR PUSTAKA.....	105

## DAFTAR TABEL

I	PENDAHULUAN.....	1
II	KEPENDUDUKAN.....	5
	Tabel 2.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin 2015-2019 .....	10
	Tabel 2.2. Persentase Penduduk Usia Produktif dan Nonproduktif serta Angka Beban Ketergantungan, 2017-2019 .....	15
	Tabel 2.3. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan, 2017-2019 .....	21
	Tabel 2.4. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan dan Pendidikan Tertinggi, 2019 .....	22
	Tabel 2.5. Persentase Penduduk yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Kelompok Umur dan Kelompok Pengeluaran, 2019 .....	24
III	PENDIDIKAN.....	25
IV	KESEHATAN.....	41
V	PERUMAHAN.....	59
VI	KONSUMSI DAN PENGELUARAN.....	75
	Tabel 6.1. Rata-Rata Pengeluaran untuk Makanan dan Bukan Makanan Perkapita Sebulan menurut Kelompok Pengeluaran, 2019.....	80
	Tabel 6.2. Persentase Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran dan Kelompok Pengeluaran Sebulan, 2019 .....	85
	Tabel 6.3. Konsumsi Kalori dan Protein Perkapita Perhari Menurut Kelompok Pengeluaran Perkapita Sebulan, 2019 .....	88
VII	SOSIAL LAINNYA.....	89
	DAFTAR PUSTAKA .....	105



## DAFTAR GAMBAR

I	PENDAHULUAN.....	1
II	KEPENDUDUKAN.....	5
	Gambar 2.1. Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen), 2015-2019 ...	11
	Gambar 2.2. Piramida Penduduk Bombana (Persen), 2019 .....	13
	Gambar 2.3. Perkembangan Proporsi Penduduk Usia Produktif, 2017-2019 .....	14
	Gambar 2.3. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktivitas, 2019 .....	16
	Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan Penduduk Usia Produktif dan Usia Belum/Tidak Produktif Lagi (Persen), 2015- 2019 .....	17
	Gambar 2.5. Persentase Penduduk Usia Produktif dan Non Produktif Menurut Jenis Kelamin, 2019 .....	18
	Gambar 2.6. Persentase Penduduk Usia Produktif dan Non Produktif Menurut Kelompok Pengeluaran, 2019.....	19
	Gambar 2.7. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, 2019 .....	20
	Gambar 2.8. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke atas yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Pendidikan Tertinggi KRT, 2019.....	23
III	PENDIDIKAN.....	25
	Gambar 3.1. Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin (persen), 2019 .....	31
	Gambar 3.2. Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Pengeluaran (persen), 2019 .....	32
	Gambar 3.3. Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan, 2019 .....	33

Gambar 3.4. Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun ke Atas Menurut Kelompok Pengeluaran dan Status Pendidikan, 2019.....	34
Gambar 3.5. Persentase Penduduk Usia Sekolah (7-24 Tahun) Menurut Kelompok Pengeluaran dan Status Pendidikan, 2019.....	35
Gambar 3.6. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (persen), 2017-2019.....	36
Gambar 3.7. Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan (persen), 2017-2019.....	37
Gambar 3.8. Perbandingan APS dan APM Laki-laki dan Perempuan di Semua Jenjang Pendidikan, 2019 .....	38
IV KESEHATAN .....	41
Gambar 4.1. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Kelompok Pengeluaran, 2019 ...	47
Gambar 4.2. Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan, 2019 .....	48
Gambar 4.3. Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Menurut Kelompok Pengeluaran, 2019 .....	49
Gambar 4.4. Persentase Baduta yang Diberi Air Susu Ibu Menurut Kelompok Pengeluaran, 2019 .....	51
Gambar 4.5. Persentase Balita yang Memiliki Buku KIA/KMS, Menurut Kelompok Pengeluaran, 2019 .....	52
Gambar 4.6. Persentase Balita yang Memiliki Buku KIA/KMS Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi KRT, 2019 ....	53
Gambar 4.7. Persentase Balita (umur 0-59 bulan) yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi dan Kelompok Pengeluaran, 2019 .....	54
Gambar 4.8. Perilaku Merokok Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas, 2019.....	55
Gambar 4.9. Perilaku Merokok Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Pengeluaran, 2019 .....	56

Gambar 4.10. Perilaku Merokok Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditatamkan, 2019 .....	57
V PERUMAHAN.....	59
Gambar 5.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Menurut Jenis Kelamin KRT, 2019 .....	65
Gambar 5.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Menurut Kelompok Pengeluaran, 2019....	66
Gambar 5.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air yang Digunakan Untuk Memasak/Mandi/cuci/dll, 2019 .....	67
Gambar 5.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Pengeluaran dan Sumber Air yang Digunakan Untuk Memasak/Mandi/cuci/dll, 2019 .....	68
Gambar 5.5. Persentase Rumah Tangga Menurut Pendidikan Tertinggi KRT dan Sumber Air yang Digunakan Untuk Memasak/Mandi/cuci/dll, 2019.....	69
Gambar 5.6. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin KRT dan Sumber Air yang Digunakan Untuk Memasak/Mandi/cuci/dll, 2019 .....	70
Gambar 5.7. Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2019 .....	71
Gambar 5.8. Persentase Rumah Tangga Menurut Pendidikan Tertinggi KRT dan Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2019 .....	73
Gambar 5.9. Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Pengeluaran dan Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2019 .....	74
VI KONSUMSI DAN PENGELUARAN.....	75
Gambar 6.1. Rata-rata Pengeluaran untuk Makanan dan Nonmakanan Perkapita Perbulan Menurut Kelompok Pengeluaran (persen), 2019 .....	81

Gambar 6.2. Persentase Pengeluaran Perkapita per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2017 - 2019 .....	82
Gambar 6.3. Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Kelompok Makanan, 2019 .....	83
Gambar 6.4. Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Kelompok Bukan Makanan, 2019 .....	84
VII SOSIAL LAINNYA.....	89
Gambar 7.1. Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun ke Atas Menurut Penggunaan Teknologi Informasi, 2019 .....	94
Gambar 7.2. Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun ke Atas Menurut Kelompok Pengeluaran dan Penggunaan Teknologi Informasi, 2019.....	95
Gambar 7.3. Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Penggunaan Teknologi Informasi, 2019.....	96
Gambar 7.4. Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun ke Atas Menurut Akses Internet dalam Tiga Bulan Terakhir (persen), 2019 .....	97
Gambar 7.5. Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun ke Atas Menurut Kelompok Pengeluaran dan Akses Internet dalam Tiga Bulan Terakhir (persen), 2019.....	98
Gambar 7.6. Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir Akses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir (persen), 2019..	99
Gambar 7.7. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima, 2019 .....	100
Gambar 7.8. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima, 2019 .....	101
Gambar 7.9. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset Menurut Jenis Aset, 2019 .....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	105

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Jumlah penduduk Kabupaten Bombana tahun 2019 berdasarkan proyeksi penduduk 2010-2035 tercatat sebesar 184.570 jiwa. Meskipun selalu meningkat secara jumlah, laju pertumbuhan penduduk dapat dikatakan cukup terkendali dengan adanya perlambatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan penduduk 3,30 persen dan pada tahun 2019 menurun menjadi 3,11 persen. Rasio jenis kelamin Kabupaten Bombana tahun 2019 sebesar 102,15. Dapat dimaknai bahwa, penduduk laki-laki sekitar 2 persen lebih banyak dibandingkan perempuan. Berdasarkan sebaran atas distribusi penduduk, Kecamatan Poleang, Poleang Barat, dan Rumbia merupakan tiga kecamatan dengan penduduk terbesar di Bombana.

Rasio ketergantungan kabupaten Bombana selama periode 2017-2019 terus mengalami penurunan dari 58,46 pada tahun 2017 hingga 57,69 pada tahun 2019. Angka ini dapat dimaknai bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) menanggung beban sekitar 57 sampai 58 penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan/atau diatas 65 tahun).

Indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur partisipasi sekolah adalah APS dan APM. Dalam tiga tahun terakhir, secara umum Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Bombana tidak ada gejala angka yang signifikan pada setiap kelompok usia sekolah. Pada tahun 2019, hampir seluruh anak usia SD yaitu 7-12 tahun sudah bersekolah. Sedangkan pada anak usia 13-15 tahun, dari setiap 100 orang anak, sekitar 86 hingga 87 orang diantaranya sedang sekolah. Dan pada anak usia SMA yaitu 16-18 tahun, setiap 100 anak usia 16-18 tahun, 61 orang diantaranya sedang bersekolah.

Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan SD tahun 2019 yaitu sebesar 98,42 persen, artinya sekitar 98,42 persen penduduk di Kabupaten Bombana yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SD/ sederajat. APM SMP sebesar 74,70 persen, dan APM SMA sebesar 60,38 persen. Dalam tiga tahun terakhir, secara umum APM SD hingga SMA menunjukkan peningkatan.

Indikator pendidikan lainnya yang menjadi sasaran pembangunan adalah Angka Melek Huruf (AMH). AMH penduduk Bombana selama tiga tahun terakhir berada di atas 90 persen. Tidak kita pungkiri bahwa masih ada sedikit golongan masyarakat yang buta aksara/buta huruf. Pada tahun 2019, AMH masyarakat Bombana sebesar 92,63 persen. Hal ini berarti setiap 100 orang penduduk, secara rata-rata 93 orang diantaranya sudah mampu membaca dan menulis, disamping masih ada 7 orang lainnya yang belum mampu membaca dan menulis baik itu huruf latin, huruf arab, maupun huruf lainnya.

Derajat kesehatan merupakan indikator kesehatan yang menangkap fenomena jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Pada tahun 2019 terdapat 12,34 persen penduduk Bombana memiliki keluhan kesehatan. Dengan kata lain, dari setiap 100 penduduk terdapat sekitar 12 hingga 13 orang yang mengalami keluhan kesehatan pada periode sebulan terakhir waktu pendataan. Berkaitan dengan penggunaan jaminan kesehatan oleh penduduk yang berobat jalan, masih kurang dari setengahnya yang memanfaatkan layanan jaminan kesehatan tersebut, yaitu hanya sekitar 48,09 persen.

Selain itu, indikator kesehatan lainnya yang patut menjadi perhatian adalah pemberian ASI kepada bayi pada usia 1-23 bulan. Hal ini merupakan bagian penting bagi bayi dalam pemenuhan kebutuhan gizi di masa awal kehidupannya. Di Bombana, sudah 91,50 persen bayi usia 0-23 bulan pernah mendapatkan asupan ASI. Dan untuk anak usia 0-59 bulan, sebanyak 45,35 persen diantaranya sudah mendapatkan imunisasi secara lengkap.

Kondisi kesehatan masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumsinya, termasuk perilaku merokok. Pada penduduk usia 15 tahun ke atas di Bombana, hampir sepertiganya adalah perokok aktif yaitu sebanyak 32,54 persen.

Pola konsumsi masyarakat Bombana secara perlahan mulai menunjukkan pergeseran. Hal ini ditunjukkan dengan proporsi pengeluaran makanan yang perlahan berpindah ke konsumsi bukan makanan. Pada tahun 2018, sebanyak 51,01 persen konsumsi masyarakat dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan makanan, dan pada tahun 2019 proporsi tersebut menurun menjadi 45,99 persen. Di sisi lain, proporsi pengeluaran untuk nonmakanan meningkat dari 48,99 persen menjadi 54,01 persen.

Berkaitan dengan indikator perumahan, hasil pendataan Susenas Maret 2019 menunjukkan bahwa 85,18 persen rumah tangga di Kabupaten Bombana menempati tempat tinggal dengan status milik sendiri. Sumber air minum terbesar rumah tangga di Bombana adalah sumur/mata air terlindung, yaitu mencapai 43,9 persen rumah tangga pengguna. Sisanya, 31,34 rumah tangga menggunakan sumur bor/pompa sebagai sumber air utamanya; sedangkan pengguna air ledeng (PDAM) sejumlah 20,73 persen. Berkaitan dengan sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air yang digunakan sendiri meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 baru 63,71 persen saja rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air dan digunakan sendiri, pada tahun 2019 jumlahnya bertambah menjadi 73,59 persen.

#### INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BOMBANA, 2019



# PENDAHULUAN

KEPENDUDUKAN

PENDIDIKAN

SOSIAL  
LAINNYA

SUSENAS  
2019

KESEHATAN

KONSUMSI DAN  
PENGELUARAN

PERUMAHAN





## 1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan, lingkungan hidup, keamanan, politik, dan lain sebagainya. Hasil pembangunan diharapkan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun diakui bahwa keragaman budaya, adat istiadat, sumber daya, keadaan geografis, serta potensi alam yang ada mengakibatkan beragam pula pencapaian hasil-hasil pembangunan antar wilayah. Oleh sebab itu, monitoring terhadap hasil pembangunan mutlak diperlukan untuk melihat sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Sehingga program pembangunan berikutnya dapat lebih dioptimalkan.

Proses pembangunan semacam ini merupakan suatu usaha jangka panjang yang memerlukan data penunjang untuk setiap tahap dan komponennya. Sumber informasi utama mengenai berbagai indikator kesejahteraan rakyat berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Disamping itu juga didukung dengan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Adanya otonomi daerah menjadikan kebutuhan data semakin detail. Data hingga level kabupaten/kota diperlukan oleh pemerintah daerah sebagai dasar perumusan kebijakan maupun evaluasi program pembangunan daerah. Dengan demikian publikasi ini disusun untuk memenuhi kebutuhan data tentang indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten Bombana. Data yang disajikan diharapkan dapat menggambarkan taraf hidup dan perkembangan kesejahteraan rakyat di Bombana pada tahun 2019.

## 1.3 Ruang Lingkup

Analisis kesejahteraan rakyat ini menyajikan data dan informasi pada tahun 2019. Beberapa data disajikan dalam series tiga hingga lima tahun untuk memperkaya makna pada data-data tertentu. Data dan informasi

yang disajikan pada analisis ini menggambarkan kondisi Kabupaten Bombana.

#### 1.4 Sumber Data

Publikasi ini disusun dengan sumber data utama berasal dari hasil pengolahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2019. Susenas merupakan salah satu kegiatan survei yang dirancang oleh BPS dengan maksud untuk mengumpulkan data yang dapat mencerminkan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Data yang dikumpulkan mencakup bidang kependudukan, pendidikan, kesehatan, perumahan, konsumsi/ pengeluaran dan kondisi sosial ekonomi lainnya. Data ini digunakan sebagai dasar untuk memperoleh berbagai indikator pencapaian kesejahteraan rakyat.

Susenas Maret 2019 dilakukan terhadap 510 rumah tangga sampel yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Bombana. Hasil proyeksi penduduk 2010-2035 digunakan sebagai data penimbang dalam proses estimasi hasil survei tersebut.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bombana 2019 disajikan dalam 7 bab, yaitu:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Kependudukan
- Bab III : Pendidikan
- Bab IV : Kesehatan
- Bab V : Perumahan
- Bab VI : Konsumsi dan Pengeluaran
- Bab VII : Sosial lainnya

# KEPENDUDUKAN



Usia Belum Produktif

**33,40 %**

Usia Produktif

**62,17 %**

Usia Tidak produktif lagi

**4,42 %**

2



## Konsep dan Definisi

- **Angka beban tanggungan/rasio ketergantungan** adalah Persentase yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif dengan penduduk usia produktif.
- **Kepadatan penduduk** adalah rata-rata jumlah penduduk per luas wilayah (kilometer persegi)
- **Penduduk** adalah semua orang yang telah berdomisili selama enam bulan atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan dan bertujuan menetap.
- **Penduduk usia produktif** adalah penduduk dengan usia antara 15 sampai 64 tahun.
- **Penduduk usia tidak produktif** adalah penduduk usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun.
- **Piramida penduduk** adalah grafik berbentuk piramida yang merupakan gambaran secara visual dari komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin.
- **Rasio jenis kelamin/ sex ratio** adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu.
- **Tingkat pertumbuhan penduduk** adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase.
- **Kelompok ekonomi bawah** merupakan 40 persen masyarakat dengan pengeluaran terendah di Bombana.
- **Kelompok ekonomi menengah** merupakan 40 persen masyarakat dengan pengeluaran menengah di Bombana.

- **Kelompok ekonomi atas** merupakan 20 persen masyarakat dengan pengeluaran tertinggi di Bombana.

<https://bombanakab.bps.go.id>

Dalam mekanisme perencanaan pembangunan, informasi kependudukan merupakan salah satu data yang strategis dikarenakan penduduk bukan hanya sebagai sasaran pembangunan melainkan sekaligus sebagai pelaksana pembangunan itu sendiri. Atas dasar pemikiran tersebut, pembangunan suatu wilayah termasuk pembangunan daerah dititikberatkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas SDM diperlukan karena jumlah penduduk yang besar dapat menjadi aset pembangunan jika kualitasnya baik. Namun sebaliknya, bisa pula menjadi beban pembangunan ketika kualitasnya rendah.

Kualitas SDM yang rendah dapat terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali serta tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan serta kesehatan yang layak. Perihal kualitas SDM akan sangat mungkin menimbulkan berbagai masalah kesejahteraan masyarakat. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan meningkatnya angka kematian. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak merata/mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan sebagainya.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi persoalan yang perlu ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk perlu terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Sehingga, kesejahteraan hidup masyarakat dapat diingkatkan.

Persebaran, kepadatan, komposisi, dan struktur penduduk merupakan informasi penting yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan suatu daerah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam bab ini akan diuraikan berbagai indikator kependudukan di Kabupaten Bombana kondisi tahun 2019.

## 2.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin

Kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah berkaitan erat dengan kondisi kependudukannya. Semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar pula tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keberadaan dan kebutuhan penduduk di wilayahnya tersebut.

Jumlah penduduk terus mengalami peningkatan dalam periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2015 jumlah penduduk yang berdomisili sebanyak 164.809 jiwa. Dengan adanya perubahan kondisi demografi seperti kelahiran, kematian dan migrasi penduduk menyebabkan jumlah ini terus bertambah hingga pada tahun 2019 jumlah penduduk menjadi 184.570 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk setiap tahun disajikan pada tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin 2015-2019**

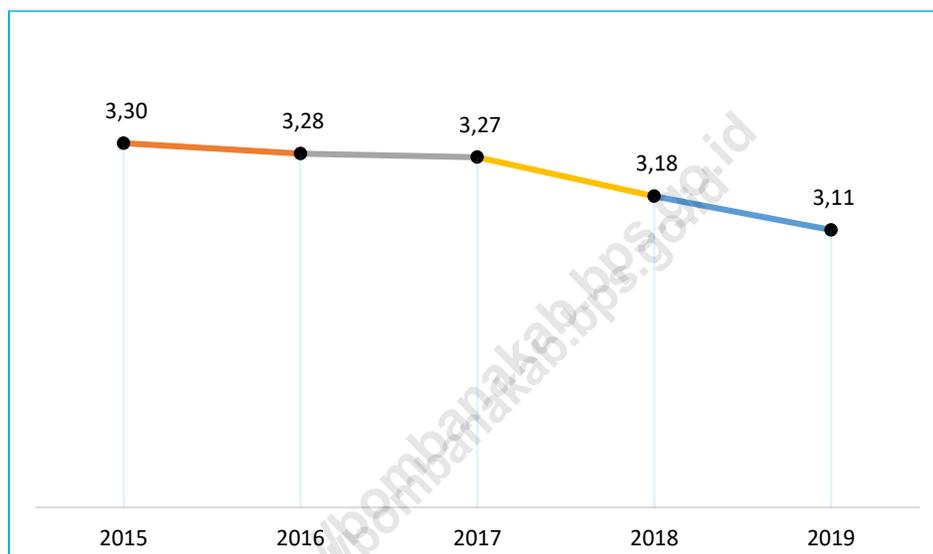
Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	164 809	3,30	101,93
2016	170 020	3,28	101,83
2017	175 497	3,27	101,96
2018	180 035	3,18	102,26
2019	184 570	3,11	102,15

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Secara umum penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Hal ini bisa dijelaskan melalui indikator rasio jenis kelamin (*Sex Ratio*). Dalam lima tahun terakhir, rasio jenis kelamin berada pada rentang angka 101 sampai dengan 102. Pada tahun 2019, *sex ratio* sebesar 102,15. Artinya, setiap 100 penduduk perempuan, ada sebanyak 102 sampai 103 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki 2 sampai 3 persen lebih banyak dibanding perempuan. Data mengenai rasio jenis

kelamin bermanfaat dalam pengembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender. Sebagai contoh, informasi rasio jenis kelamin diketahui oleh para politisi dalam mempertimbangkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

**Gambar 2.1. Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen), 2015-2019**



Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Dilihat dari laju pertumbuhan setiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk cenderung menurun. Pada tahun 2019 tercatat sebesar 3,11 persen atau mengalami sedikit perlambatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 3,18 persen. Jika diamati selama lima tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk terus menunjukkan perlambatan setiap tahunnya. Yaitu dari 3,30 persen pada tahun 2015 menjadi 3,28 persen tahun 2016 dan selanjutnya 3,27 persen di tahun 2017 dan 3,18 persen di tahun 2018. Berdasarkan data tersebut, dapat diartikan bahwa pertumbuhan penduduk cukup terkendali, jumlah penduduk yang terus bertambah diimbangi dengan laju pertumbuhan yang melambat setiap tahunnya.

Persebaran dan kepadatan penduduk menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam memberikan daya tampung dan daya dukung terhadap penduduknya. Persebaran penduduk yang tidak merata

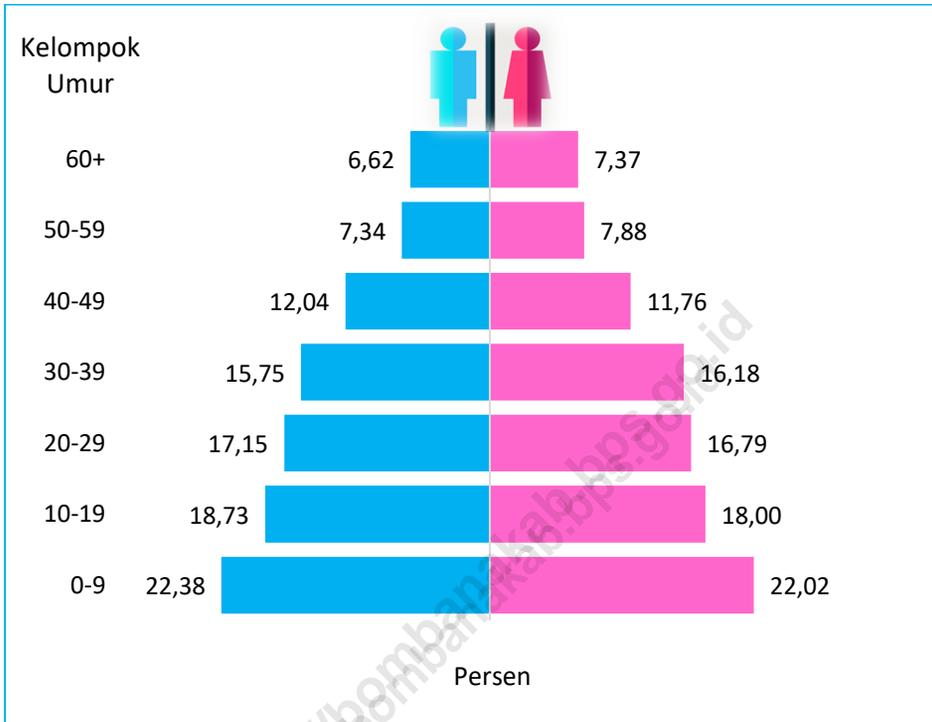
mengindikasikan daya dukung lingkungan yang tidak seimbang antara daerah *rural* (perdesaan) dan *urban* (perkotaan). Tingkat kepadatan penduduk yang rendah dan tidak merata bisa mengakibatkan penyediaan fasilitas umum menjadi relatif tidak tepat guna. Di samping itu, kepadatan yang terlampau tinggi juga akan memicu permasalahan dalam penyediaan sarana dan prasarana serta dapat memicu konflik sosial di masyarakat. Umumnya, ada kecenderungan bagi masyarakat untuk memilih bermukim di wilayah yang lebih dekat dengan berbagai fasilitas vital seperti pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.

Kondisi pada tahun 2019, rata-rata kepadatan penduduk yaitu 56 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk dalam bahasan ini tidak mempertimbangkan wilayah pemukiman dengan wilayah bukan pemukiman. Oleh karena itu, luasnya kawasan hutan sangat memengaruhi hasil penghitungan indikator ini. Perkembangan distribusi dan kepadatan penduduk dari tahun ke tahun perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama dalam upaya pemerataan pembangunan. Masalah yang sering timbul akibat ketimpangan distribusi dan kepadatan penduduk umumnya berhubungan dengan perumahan, kesehatan, dan keamanan.

## 2.2 Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Lebarnya dasar piramida (gambar 2.2) menunjukkan bahwa penduduk usia muda (dibawah 15 tahun) relatif banyak jumlahnya. Terutama terlihat jelas pada dasar piramida yang terbawah, menunjukkan persentase terbesar dibandingkan kelompok umur lainnya, kondisi ini berarti bahwa komposisi penduduk terbesar berada pada kelompok umur 0-9 tahun baik penduduk laki-laki (22,38 persen) maupun perempuan (22,02 persen). Tingginya persentase penduduk usia 0-9 tahun ini sekaligus menunjukkan bahwa tingginya angka kelahiran di Kabupaten Bombana.

Gambar 2.2. Piramida Penduduk Bombana (Persen), 2019

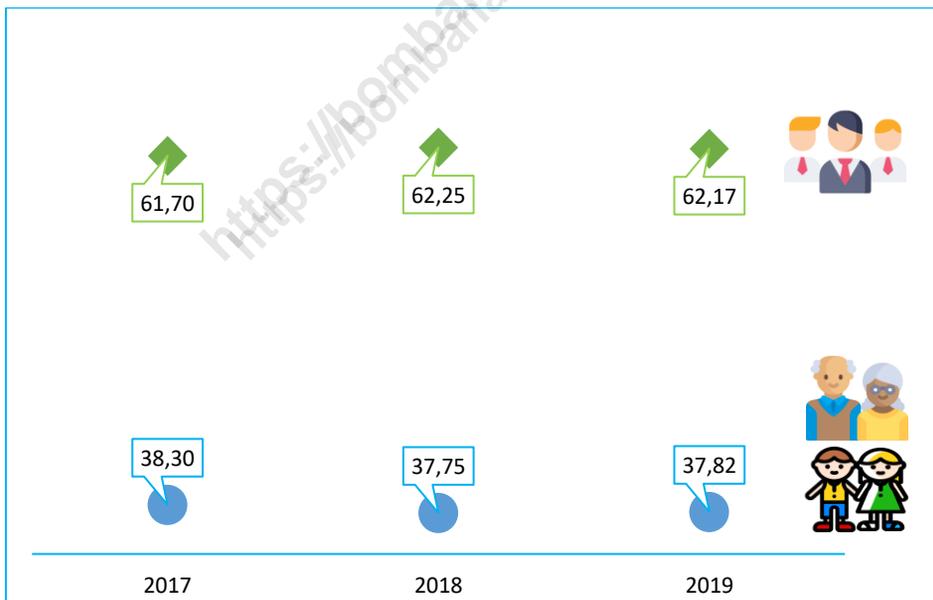


Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Jika diamati perbandingan komposisi penduduk dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan persentase secara total pada penduduk kelompok umur 0-9 tahun. Pada tahun 2018, kelompok umur 0-9 tahun 20,63 persen, namun tahun ini menjadi 22,21 persen atau meningkat hampir dua persen dalam waktu satu tahun. Kelompok umur lainnya yang mengalami peningkatan secara proporsi yaitu penduduk usia 20-29 tahun dan 40-49 tahun. Di sisi lain, penduduk kelompok usia 10-19 tahun, 30-39 tahun, 50-59 tahun dan 60 tahun ke atas mengalami penurunan secara proporsi terhadap keseluruhan penduduk di Kabupaten Bombana. Pola yang hampir sama terjadi baik pada kelompok penduduk perempuan maupun laki-laki. Fenomena meningkatnya persentase penduduk usia 0-9 tahun dan menurunnya proporsi penduduk usia 60 tahun ke atas semakin memperjelas bahwa, adanya indikasi tingginya angka kelahiran maupun angka kematian di kabupaten Bombana.

Ketika kita berfokus pada kelompok usia produktif dan tidak produktif, ada pola yang mulai bergeser di tahun 2019. Secara proporsi, terlihat kecenderungan yang menurun pada penduduk kelompok usia produktif. Pada tahun 2018 sekitar 62,25 persen penduduk merupakan usia produktif (15-64 tahun). Dan pada tahun 2019 proporsinya menjadi 62,17 persen. Penurunan 0,8 persen ini, jika dikonversikan menjadi jumlah penduduk (proyeksi) di Bombana, mencapai lebih dari 1.400 jiwa. Pergeseran distribusi ini bisa terjadi sebagai akibat dari migrasi keluar penduduk usia produktif yang besar, apakah itu untuk melanjutkan pendidikan di luar kabupaten atau mencari pekerjaan. Sebab lainnya, juga bisa akibat faktor alamiah yaitu jumlah penduduk dengan usia akan memasuki kategori produktif tidak lebih banyak dibandingkan penduduk yang mendekati usia tidak produktif lagi (lanjut usia).

**Gambar 2.3. Perkembangan Proporsi Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif, 2017-2019**



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2017-2019

## 2.2 Angka Beban Ketergantungan

Meninjau lebih jauh mengenai kondisi kependudukan di Kabupaten Bombana, dapat diperoleh analisis mengenai angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) yang merupakan salah satu indikator demografi yang cukup penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif dalam membiayai konsumsi makanan dan bukan makanan penduduk usia belum produktif dan tidak produktif lagi.

Pada tahun 2019, proporsi penduduk belum dan tidak produktif lagi terhadap keseluruhan penduduk sekitar 37,82 persen dan proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 62,17 persen. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa kelompok usia produktif masih mendominasi.

**Tabel 2.2. Persentase Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif serta Angka Beban Ketergantungan, 2017-2019**

Jumlah Penduduk	2017	2018	2019
(1)	(4)	(5)	(6)
Usia Produktif	61,70	62,25	62,17
Usia Tidak Produktif	38,30	37,75	37,82
Angka Beban Ketergantungan	58,46	58,08	57,69

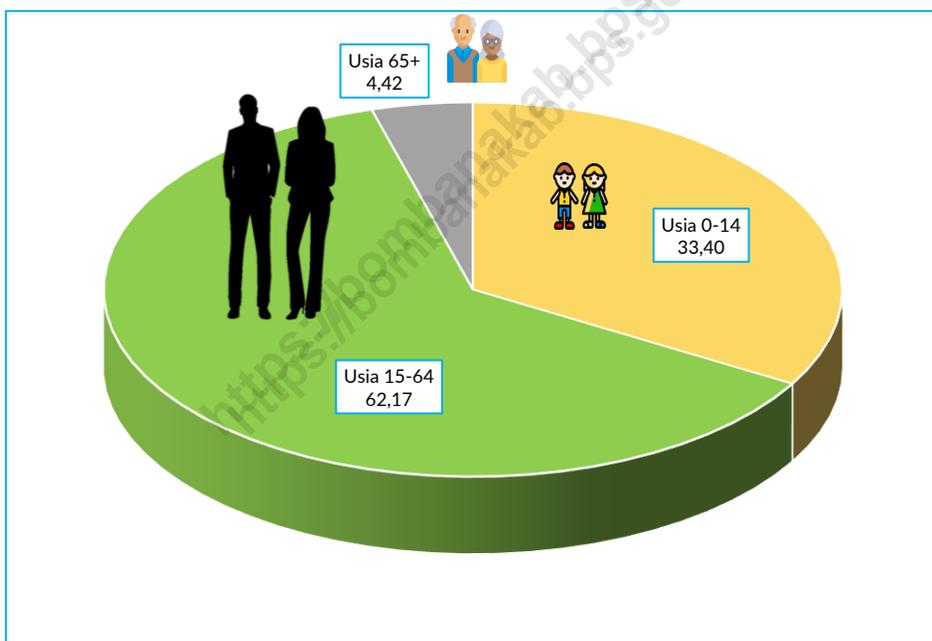
Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Angka beban ketergantungan menunjukkan penurunan dalam tiga tahun terakhir. Rasio Ketergantungan pada tahun 2019 sebesar 57,69 persen, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung biaya konsumsi (makanan dan bukan makanan) sekitar 57 sampai 58 orang penduduk usia tidak produktif. Semakin kecil rasio ketergantungan di suatu wilayah, maka akan memperbesar peluang wilayah tersebut memperoleh keuntungan demografi yang dikenal dengan istilah 'bonus demografi'. Bonus demografi dapat didefinisikan sebagai kondisi menguntungkan bagi pembangunan daerah karena tingginya

jumlah penduduk usia produktif yang menanggung sedikit penduduk usia tidak produktif.

Penduduk kelompok usia produktif merupakan aset yang sangat berharga karena diharapkan dapat menopang ekonomi dalam keluarga atau secara gamblang mereka diharapkan dapat menjadi tulang punggung keluarga. Oleh karena itu, dalam skala yang lebih luas, dominasi keberadaan penduduk usia produktif diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah tempat tinggalnya.

**Gambar 2.3. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktivitas, 2019**

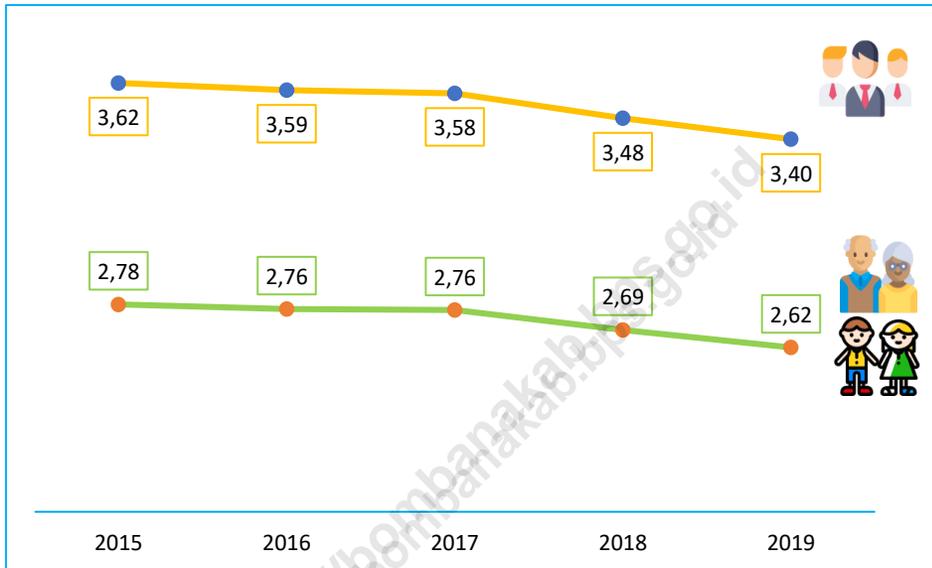


Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Dampak keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut kelompok umur seperti tercermin pada diagram di atas. Semakin rendah angka beban ketergantungan, berarti semakin kecil beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif dalam pemenuhan kebutuhan keseharian keluarganya, baik itu kebutuhan makanan maupun kebutuhan bukan

makanan. Dengan demikian akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi mereka untuk meningkatkan kualitas dirinya.

**Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan Penduduk Usia Produktif dan Usia Belum/Tidak Produktif Lagi (Persen), 2015-2019**



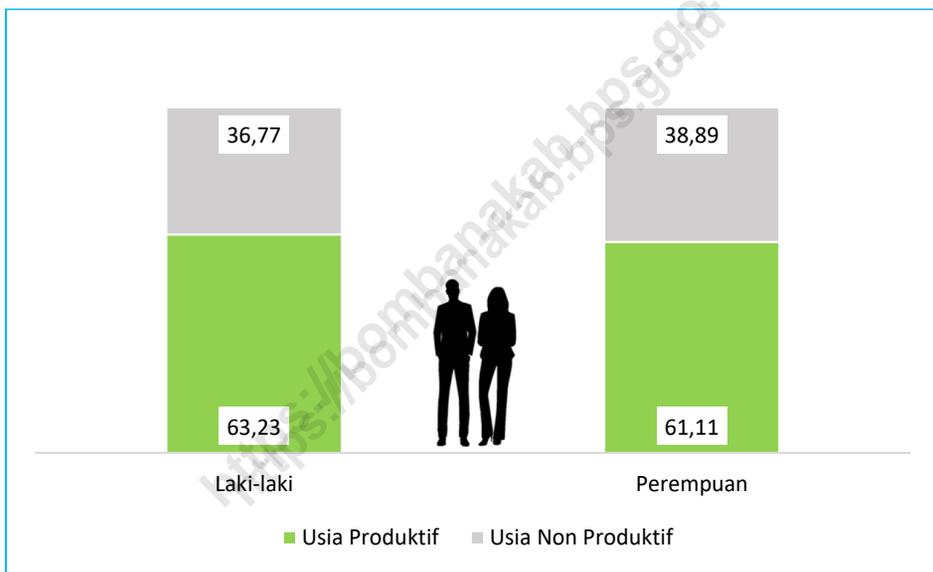
Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Berdasarkan gambar 2.3, dapat diamati bahwa pertumbuhan penduduk usia belum/tidak produktif lagi (grafik bawah) masih lebih kecil dari pada pertumbuhan penduduk usia produktif (grafik atas). Dengan demikian, walaupun penduduk usia belum/tidak produktif lagi terus meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan tersebut masih lebih kecil daripada peningkatan penduduk usia produktif. Kondisi demikian menjelaskan mengapa rasio ketergantungan terus menurun walaupun secara absolut penduduk usia belum/tidak produktif lagi terus meningkat dari tahun ke tahun.

Rasio ketergantungan yang cenderung menurun tersebut diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada saat itu terjadi bonus demografi, dimana terbuka peluang yang besar untuk melakukan investasi SDM guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Bonus demografi apabila dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan produksi dan seterusnya meningkatkan nilai

tambah perekonomian suatu wilayah. Namun, apabila tidak terkelola dengan baik, bonus demografi dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik di masyarakat. Ketersediaan lapangan kerja yang layak dan memadai, sarana pengembangan kompetensi diri untuk meningkatkan kualitas SDM supaya mampu menghadapi persaingan global, diperlukan untuk mengimbangi bonus demografi yang segera akan kita hadapi dalam beberapa waktu ke depan.

**Gambar 2.5. Persentase Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif Menurut Jenis Kelamin, 2019**

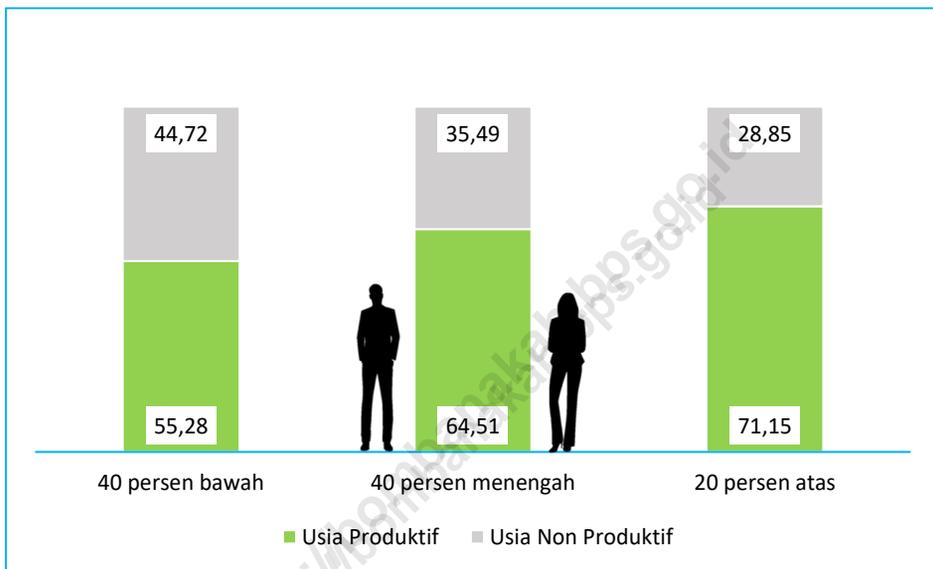


Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Meninjau lebih jauh mengenai komposisi penduduk usia produktif menurut jenis kelamin, terlihat pada Gambar 2.5 bahwa persentase penduduk laki-laki yang produktif diantara seluruh penduduk laki-laki di `` lebih besar dibandingkan dengan kelompok perempuan usia produktif. Kondisi ini merupakan sumber daya yang potensial untuk didorong kemajuannya. Mengingat produktifitas yang dihasilkan oleh laki-laki seyogyanya akan mampu melejit lebih jauh dibandingkan perempuan. Dengan kata lain, Bombana sudah memiliki sumber daya manusia yang potensial, tinggal bagaimana SDM tersebut dikelola dengan baik, memperoleh pendidikan yang layak yang mampu meningkatkan kualitas dirinya, dan mendapatkan stimulus untuk mengembangkan potensinya

baik melalui tempat ia bekerja maupun usaha yang diciptakannya. Hendaknya dapat mendorong kemajuan perekonomian di Kabupaten Bombana.

**Gambar 2.6. Persentase Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif Menurut Kelompok Pengeluaran, 2019**

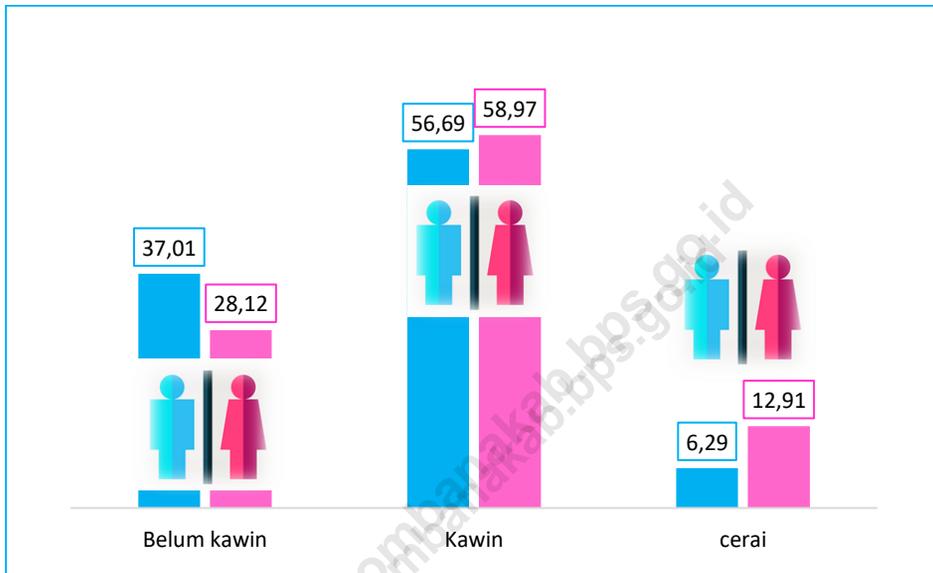


Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Ketika dikelompokkan antara penduduk usia produktif dengan penduduk tidak produktif, proporsi penduduk usia produktif masih selalu lebih besar dibandingkan yang tidak produktif. Baik itu saat ditinjau menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), maupun ketika ditinjau menurut kelompok pengeluaran. Proporsi penduduk usia produktif selalu melebihi setengahnya (di atas 50 persen). Dominasi penduduk usia produktif di berbagai kelompok ini diharapkan mampu menopang dan mendorong percepatan pergerakan ekonomi di setiap lapisan masyarakat. Mulai dari kelompok masyarakat berpengeluaran rendah hingga kelompok masyarakat berpengeluaran tinggi.

## 2.3 Status Perkawinan

**Gambar 2.7. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, 2019**



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Komposisi penduduk menurut status perkawinan menunjukkan bahwa persentase penduduk yang berstatus belum kawin pada kelompok laki-laki usia 10 tahun keatas lebih besar dibanding perempuan pada kelompok usia yang sama, yakni 37,01 persen berbanding 28,12 persen. Sementara itu penduduk yang berstatus kawin pada kelompok perempuan usia 10 tahun ke atas sebesar 58,97 persen, lebih besar dibandingkan laki-laki yaitu 56,69 persen.

Begitu pula penduduk yang berstatus cerai, persentase pada kelompok perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki, baik yang cerai hidup maupun cerai mati. Sebesar 12,91 persen perempuan kelompok usia diatas 10 tahun berstatus janda (status perkawinannya cerai mati atau cerai hidup). Sedangkan laki-laki yang berstatus duda (status perkawinannya cerai mati atau cerai hidup) sejumlah 6,29 persen pada kelompok usia yang sama.

**Tabel 2.3. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan, 2017-2019**

Status Perkawinan	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	32,01	32,46	32,59
Kawin	60,25	59,72	57,83
Cerai Hidup dan cerai mati	7,74	7,81	9,59

Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2017-2019

Secara total (laki-laki dan perempuan) persentase penduduk yang berstatus cerai (cerai hidup atau cerai mati) mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2019. Pada tahun 2017 persentase jumlah penduduk yang berstatus cerai sebanyak 7,74 persen dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 9,59 persen. Fenomena yang perlu menyita perhatian bersama, apakah peningkatan jumlah penduduk berstatus cerai ini disebabkan oleh faktor alamiah (akibat pasangan meninggal dunia/ cerai mati), ataukah perceraian yang dipicu oleh adanya konflik dalam rumah tangga.

Data yang tersaji menjadi lebih informatif ketika mengintegrasikan antara karakteristik status perkawinan dengan tingkat pengeluaran konsumsi masyarakat. Dalam bahasan ini, pengeluaran konsumsi (makanan dan nonmakanan) merupakan pendekatan untuk memperoleh gambaran pendapatan masyarakat.

Ketika masyarakat usia 10 tahun ke atas dikelompokkan berdasarkan pendapatannya, terlihat pola yang mencolok pada masyarakat berstatus cerai (tabel 2.4). Persentase tertinggi justru ada pada kelompok masyarakat dengan pendapatan tertinggi yaitu mencapai 12,10 persen diantara mereka berstatus cerai. Dari data tersebut ada indikasi bahwa kecukupan materi belum seiring sejalan dengan harmonisasi dalam keluarga.

**Tabel 2.4. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan dan Pendidikan Tertinggi, 2019**

Karakteristik	Belum/pernah kawin	Kawin	Cerai	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Kelompok pengeluaran</b>				
40 persen terbawah	35,71	55,19	9,10	100
40 persen tengah	29,74	61,54	8,72	100
20 persen teratas	32,35	55,55	12,10	100
<b>Pendidikan Tertinggi</b>				
SD ke bawah	34,66	52,51	12,83	100
SMP ke atas	29,90	64,72	5,38	100

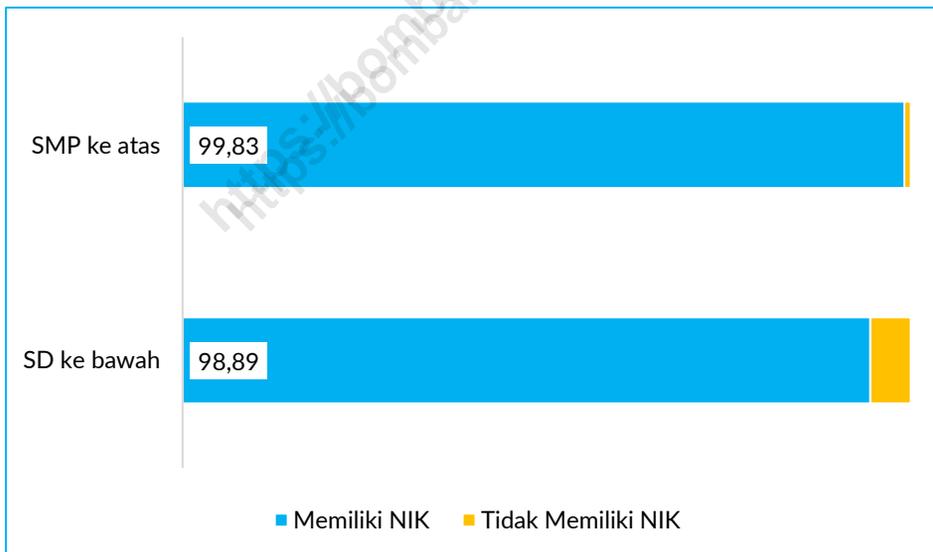
Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Mengamati keterkaitan antara karakteristik status perkawinan dengan pendidikan terakhir yang ditamatkan masyarakat. Berdasarkan data yang tersaji pada table 2.4 di atas, masyarakat usia 10 tahun ke atas yang pendidikan tertingginya SD atau di bawahnya yang berstatus kawin ada sebanyak 52,51 persen. Sedangkan pada kelompok masyarakat dengan pendidikan tertinggi SMP ke atas, yang berstatus kawin sedikit lebih tinggi yaitu 64,72 persen. Namun, jika diamati lebih lanjut untuk kasus cerai hidup maupun cerai mati, persentasenya lebih tinggi pada kelompok masyarakat dengan pendidikan tertingginya SD ke bawah yaitu 12,83 persen. Sedangkan pada kelompok masyarakat dengan pendidikan tertinggi SMP ke atas sebesar 5,38 persen.

## 2.4 Kepemilikan Kartu Identitas

Lebih lanjut bahasan mengenai kepedulian masyarakat terhadap kelengkapan administrasi kewarganegaraannya, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data mengenai kepemilikan ini akan ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi Kepala Rumah Tangga (KRT) dan kelompok pengeluaran masyarakat. Diasumsikan bahwa, kepedulian mengenai kelengkapan berkas administrasi seluruh Anggota Rumah Tangga (ART) memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat pendidikan KRT. Hasil survei 2019 lalu memperkuat dan membuktikan asumsi tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan KRT, kepemilikan akta kelahiran ART cenderung lebih tinggi pula, meskipun perbedaannya tidak begitu signifikan.

**Gambar 2.8. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke atas yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Pendidikan Tertinggi KRT, 2019**



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Dari gambar 2.8 terlihat bahwa, kepemilikan NIK oleh ART dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga SD ke bawah sebanyak 98,89 persen. Angka ini terus meningkat seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan KRT. Penduduk dengan KRT yang memiliki pendidikan

tertinggi SMP ke atas, sekitar 99,83 persen diantaranya sudah memiliki NIK.

**Tabel 2.5. Persentase Penduduk yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Kelompok Umur dan Kelompok Pengeluaran, 2019**

Kelompok Pengeluaran	Kelompok Umur	
	5 tahun ke atas	17 tahun ke atas
(1)	(2)	(3)
40 persen terbawah	98,73	98,92
40 persen tengah	99,55	99,83
20 persen teratas	99,67	100,00

Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Berdasarkan kelompok pengeluaran, persentase kepemilikan NIK masih menunjukkan pola seperti pada klasifikasi menurut tingkat pendidikan KRT. Masyarakat yang masih belum memiliki NIK banyak terdapat di kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Yang dalam hal ini didekati dengan besaran pengeluaran masyarakat

# PENDIDIKAN

Angka Melek Huruf  
Penduduk usia 15 tahun ke atas

92,63 %

3



Ijazah tertinggi yang dimiliki  
Penduduk usia 15 tahun ke atas

(-)

(Tidak memiliki  
ijazah)

24,44 %

SD

24,77 %

SMP

17,13 %

SMA

(ke atas)

33,67 %



## Konsep dan Definisi

- **Angka Melek Huruf (AMH)** adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya.
- **Angka Partisipasi Sekolah (APS)** adalah rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama.
- **Angka Partisipasi Murni (APM)** adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.
- **Tamat sekolah** adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.
- **Tidak bersekolah lagi** adalah anggota rumah tangga berumur lima tahun ke atas yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di jenjang pendidikan formal maupun nonformal (paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak terdaftar atau tidak aktif mengikuti pendidikan lagi.



Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Oleh sebab itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup, sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Undang-undang tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, dan ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warga negara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya juga diupayakan oleh pemerintah.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan, diantaranya Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM).

### 3.1 Angka Melek Huruf

Program pemberantasan buta huruf mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis dengan huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya, serta kemampuan berhitung dan berketerampilan. Dengan kemampuan tersebut memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tujuan lain adalah menciptakan tenaga lokal yang potensial guna mengelola sumber daya yang ada di lingkungannya. Dari dunia pendidikan, diharapkan dapat menekan angka putus sekolah. Program pemberantasan buta huruf sebetulnya sudah berjalan sejak zaman kemerdekaan, bahkan dalam sejarahnya negara Indonesia pernah memproklamkan bebas buta huruf. Namun dalam perjalanannya terjadi pasang surut.

Kemampuan baca tulis merupakan ukuran mendasar dari tingkat pendidikan seseorang. Angka melek huruf (AMH) digunakan untuk mengkaji seberapa banyak penduduk suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, menambah pengetahuan dan keterampilan, memudahkan komunikasi, serta mempromosikan pemahaman yang lebih baik sehingga penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Angka Melek Huruf (AMH) didefinisikan sebagai persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab dan huruf lainnya. AMH berkisar antara 0-100. Angka melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang

efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin tinggi pula mutu sumber daya manusia suatu masyarakat.

**Gambar 3.1. Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin (persen), 2019**



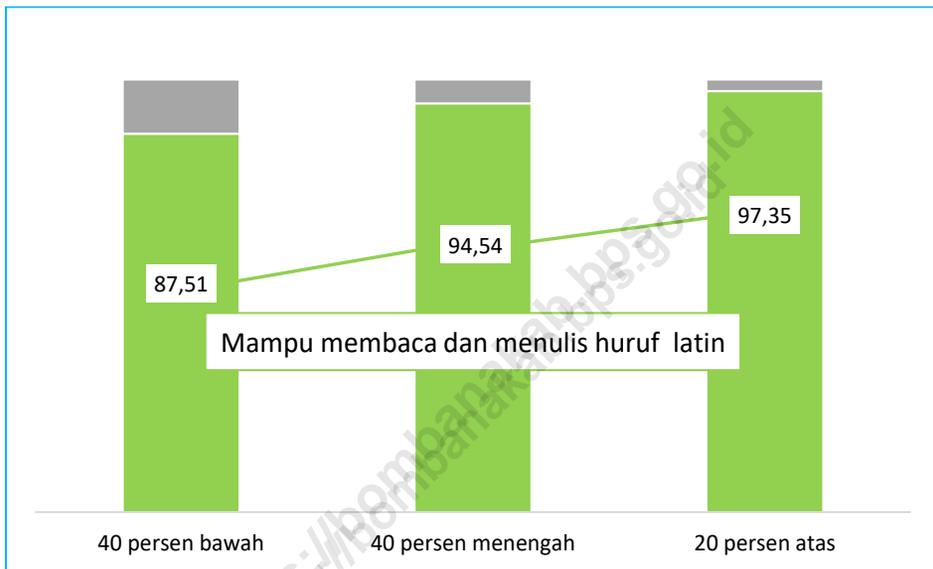
Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Angka Melek Huruf (AMH) selama tiga tahun terakhir berada di atas 90 persen. Program pemberantasan buta aksara secara nasional telah menunjukkan adanya keberhasilan, namun demikian program ini perlu untuk terus dilakukan sehingga angka buta aksara masyarakat dapat terus ditekan dan semakin menurun tiap tahunnya.

Pada tahun 2019, secara total AMH 92,63 persen. Tidak kita pungkiri bahwa masih ada sedikit golongan masyarakat yang buta aksara/buta huruf. Jika ditinjau menurut kategori jenis kelamin, terlihat bahwa AMH laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Pada tahun 2019, persentase penduduk laki-laki yang tidak mampu baca tulis mencapai 4,58 persen, sedangkan perempuan lebih tinggi lagi yaitu 10,25 persen. Artinya, dalam 100 penduduk perempuan usia 15 tahun keatas, terdapat 11 orang

yang tidak memiliki kemampuan baca tulis. Sedangkan dari setiap 100 penduduk laki-laki terdapat 5 orang yang belum mampu membaca dan menulis baik itu huruf latin, huruf arab, maupun huruf lainnya.

**Gambar 3.2. Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Pengeluaran (persen), 2019**



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Kondisi ekonomi masyarakat juga memengaruhi kemampuan baca tulis mereka. Dari gambar 3.2 di atas, secara umum terlihat bahwa, semakin baik kualitas ekonomi masyarakat, maka semakin sedikit yang tidak memiliki kemampuan baca tulis. Dengan kata lain, angka buta huruf semakin kecil.

### 3.2 Status Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Hal ini bisa tergambar melalui tingkat pendidikan yang ditamatkan. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan yang tinggi diharapkan akan memiliki pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi pula. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian seseorang, akan semakin mudah mendapatkan

kesempatan untuk bekerja maupun membuka peluang usaha. Disamping itu, pendidikan tinggi menjadi penting dalam persaingan ekonomi saat ini sebab semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, umumnya semakin tinggi pula standar pendapatan yang diperoleh terutama jika lapangan kerja yang ditekuni sesuai dengan bidang ilmu/keahlian yang dimiliki. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah.

**Gambar 3.3. Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan, 2019**

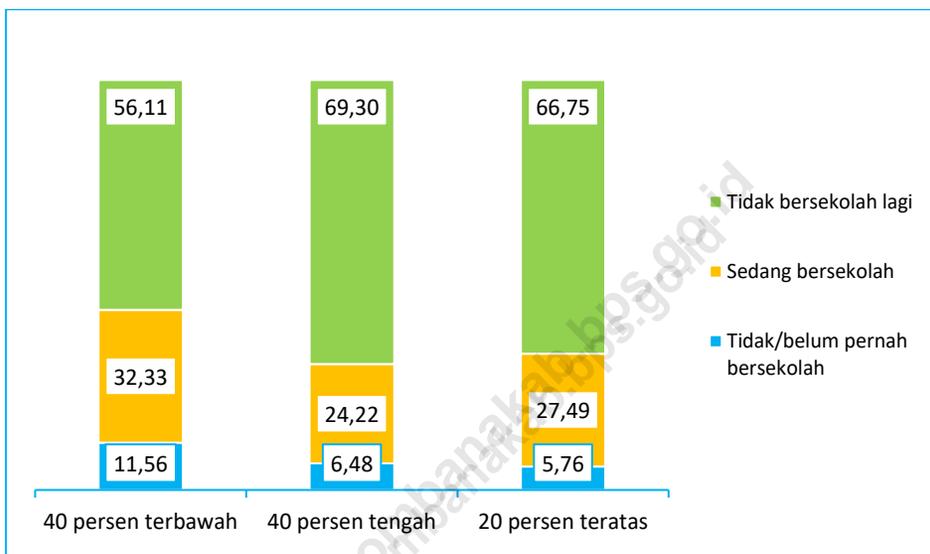


Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Melihat kelompok masyarakat menurut status pendidikannya, masyarakat yang tidak atau belum pernah sekolah persentasenya di kelompok perempuan cukup tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 10,38 persen. Yang artinya, dalam setiap 100 orang perempuan usia lima tahun ke atas terdapat 10 sampai 11 orang yang tidak/belum pernah sekolah. Sedangkan untuk kelompok laki-laki, dari 100 orang laki-laki 6 sampai 7 orang diantaranya tidak/belum pernah bersekolah. Perbandingan data antara kedua gender ini seiring dengan data angka melek huruf yang dibahas sebelumnya. Dimana, ketidakmampuan membaca dan menulis di

tengah masyarakat lebih banyak persentasenya di kelompok perempuan daripada laki-laki di dalam kelompoknya masing-masing.

**Gambar 3.4. Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun ke Atas Menurut Kelompok Pengeluaran dan Status Pendidikan, 2019**

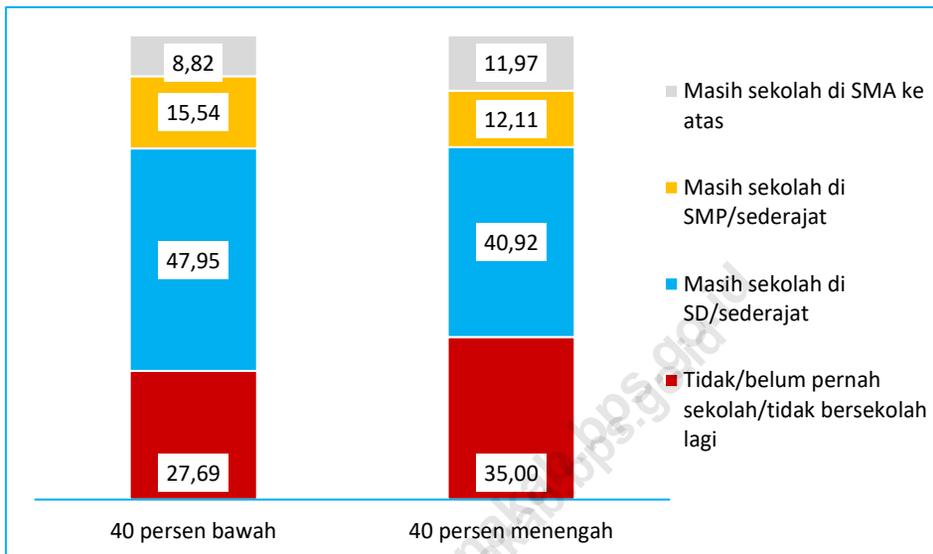


Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Dari gambar diatas terlihat bahwa, lebih dari separuh masyarakat di setiap kelompok pengeluaran sudah tidak bersekolah lagi. Artinya, kelompok yang banyak ini sudah pernah melalui jenjang pendidikan formal. Dengan demikian, sejalan dengan besarnya proporsi penduduk usia produktif yang dimiliki Kabupaten Bombana, dan besarnya persentase mereka yang sudah pernah menjajaki dunia pendidikan, seyogyanya kondisi demikian dapat menjadi tumpuan harapan bagi kemajuan daerah ke depannya.

Hal lain yang juga mencolok terlihat adalah persentase yang cukup tinggi pada kategori penduduk yang tidak/belum pernah sekolah di kelompok masyarakat ekonomi bawah, yaitu mencapai 11,56 persen. Sangat berbeda saat melihat kelompok masyarakat ekonomi menengah dan tinggi, dimana persentase yang tidak/belum pernah bersekolah secara berturut-turut yaitu 6,48 dan 5,76 persen.

**Gambar 3.5. Persentase Penduduk Usia Sekolah (7-24 Tahun) Menurut Kelompok Pengeluaran dan Status Pendidikan, 2019**



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Gambar 3.5 di atas berfokus pada status pendidikan anak usia sekolah yang berada dalam kelompok berpengeluaran 40 persen terbawah dan 40 persen menengah. Persentase anak usia sekolah yang tidak/ belum pernah sekolah/ tidak bersekolah lagi cukup besar, yaitu 35 persen pada kelompok masyarakat menengah dan 27,69 persen pada kelompok masyarakat terbawah. Terdapat dua kemungkinan pada angka ini, yang pertama dimungkinkan memang cukup banyak masyarakat yang tidak/ belum pernah sekolah atau kemungkinan keduanya adalah banyak masyarakat yang sudah tidak bersekolah lagi dengan berbagai alasan. Apakah karena putus sekolah/ tidak menamatkan program wajib belajar 12 tahun atau yang sudah menyelesaikan pendidikan sampai level Sekolah Menengah Atas namun tidak melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Rentang umur yang dicakup dalam data ini cukup lebar yaitu sampai usia 24 tahun yang setara dengan usia maksimal (dalam kondisi normal) seseorang untuk menyelesaikan pendidikan hingga program sarjana.

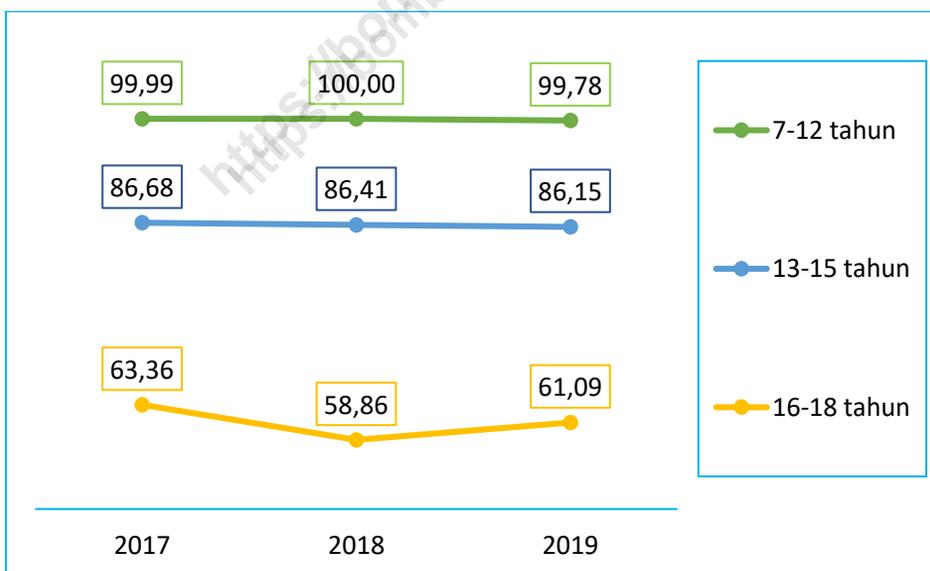
Disamping itu, juga terlihat bahwa, penduduk usia sekolah di didominasi oleh anak usia Sekolah Dasar, yaitu 47,95 persen pada kelompok berpengeluaran rendah dan 40,92 persen pada masyarakat kelompok menengah.

### 3.3 Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah dapat diukur melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Program pembangunan oleh pemerintah di bidang pendidikan selalu mengarah pada peningkatan kedua indikator ini pada setiap kelompok umur dan jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) mengukur proporsi anak yang masih bersekolah pada suatu kelompok umur sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Angka ini memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah, tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang diikuti.

**Gambar 3.6. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (persen), 2017-2019**



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2017-2019

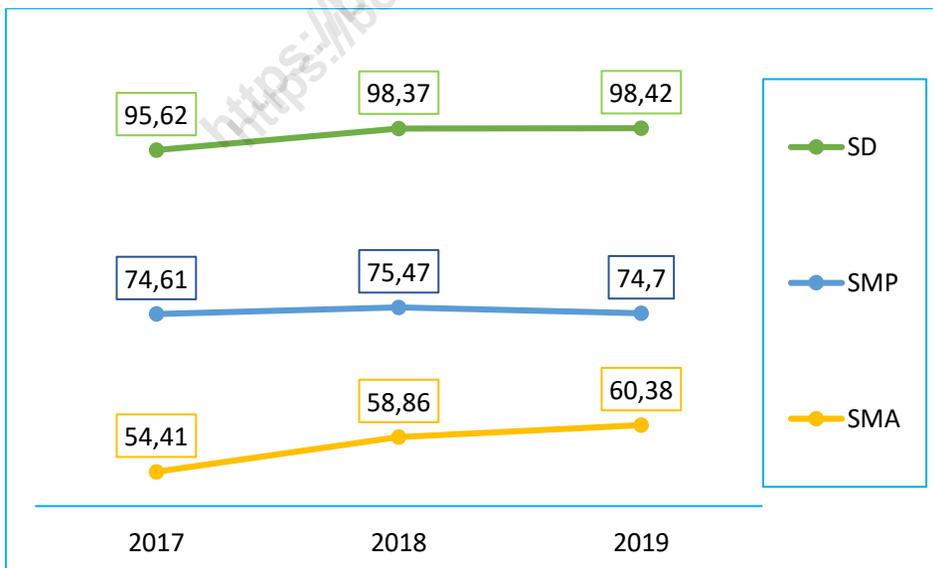
Secara umum angka partisipasi sekolah penduduk Bombana cenderung menurun seiring meningkatnya kelompok umur yang diklasifikasikan. Tingginya angka partisipasi sekolah pada kelompok umur

yang lebih rendah mengindikasikan keberhasilan program perluasan kesempatan sekolah melalui pendidikan dasar gratis yang dicanangkan oleh pemerintah.

Pada tahun 2019, penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah sebanyak 99,78 persen, sedangkan pada kelompok umur 13-15 tahun sebanyak 86,15 persen yang bersekolah. Demikian juga persentase partisipasi sekolah menurun pada kelompok umur 16-18 tahun atau usia SMA, persentase penduduk usia tersebut yang masih sebanyak 61,09 persen.

Berdasarkan data pada gambar 3.6, pada tahun 2019 dari setiap 100 anak usia 16-18 tahun, 61 orang diantaranya sedang sekolah. Sebaliknya, 39 orang lainnya di usia tersebut tidak bersekolah. Diharapkan APS terus menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun sebagai indikasi bahwa anak usia sekolah dapat memperoleh hak pendidikannya.

**Gambar 3.7. Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan (persen), 2017-2019**



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2017-2019

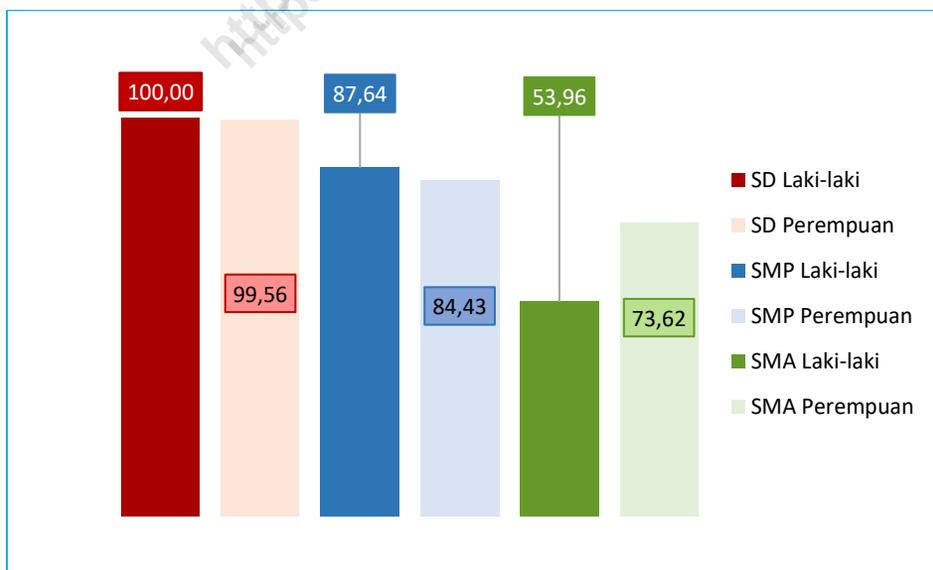
Indikator pendidikan selanjutnya yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) yang merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur

tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Yaitu usia 7-12 tahun bersekolah SD/ sederajat, 13-15 tahun bersekolah SMP/ sederajat, dan 16-18 tahun bersekolah SMA/ SMK sederajat.

APM SD tahun 2019 sebesar 98,42 persen, artinya sekitar 98,42 persen penduduk yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SD/ sederajat. APM SMP sebesar 74,70 persen, dan APM SMA sebesar 60,38 persen. Partisipasi penduduk usia 16-18 tahun yang sedang sekolah di SMA/ SMK sederajat yaitu 60 orang dari setiap 100 orang. Dalam tiga tahun terakhir, secara umum APM SD hingga SMA menunjukkan peningkatan, meskipun pada tahun 2019 sempat mengalami sedikit penurunan pada tingkat SMP.

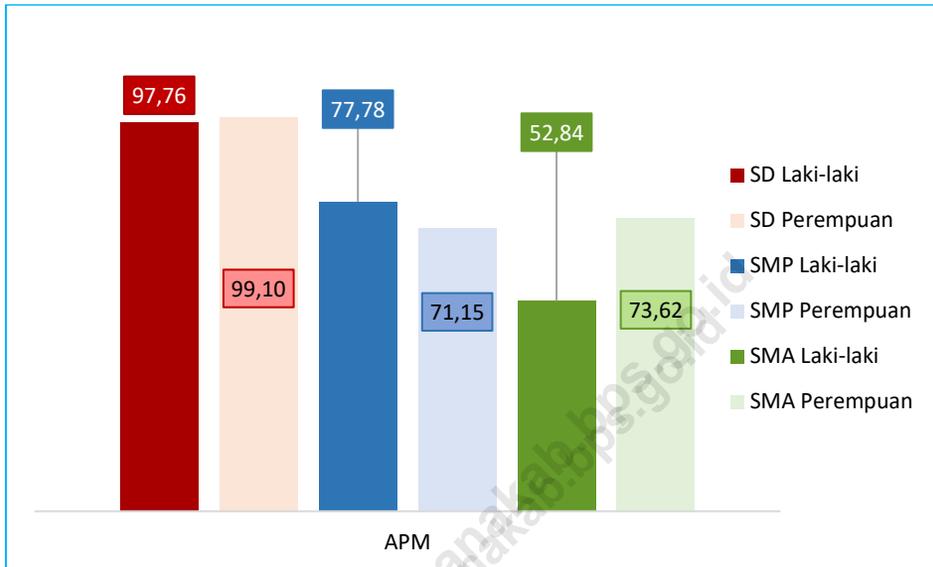
Secara umum, terlihat pola yang menarik jika dibandingkan antara partisipasi penduduk laki-laki dan perempuan dalam dunia pendidikan (bersekolah). Baik dalam indikator angka partisipasi sekolah, maupun angka partisipasi murni untuk setiap jenjang Pendidikan.

**Gambar 3.8. Perbandingan APS Laki-laki dan Perempuan di Semua Jenjang Pendidikan, 2019**



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

**Gambar 3.9. Perbandingan APM Laki-laki dan Perempuan di Semua Jenjang Pendidikan, 2019**



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Umumnya angka partisipasi kelompok penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan kelompok penduduk perempuan kecuali pada APS dan APM penduduk usia 16-18 tahun atau yang bersekolah di SMA/SMK/ sederajat, angka partisipasi perempuan lebih tinggi dibandingkan kelompok penduduk laki-laki. Pada kelompok perempuan, APS tahun 2019 sebesar 73,62 persen

Pada tingkat usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun, tidak ada perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan, persentase APS nya relatif hampir sama. Namun, berbeda dengan penduduk usia 16-18 tahun. APS kelompok penduduk laki-laki yaitu 53,96 persen, dan pada kelompok penduduk perempuan angkanya lebih tinggi yaitu 73,62 persen.



# KESEHATAN

# 4



**12,34 %** Angka Kesakitan

**45,35 %**  
Balita mendapat  
Imunisasi Lengkap





## Konsep dan Definisi

- **Angka kesakitan** adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari.
- **Berobat jalan** adalah upaya anggota rumah tangga yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah pasien.
- **Baduta** adalah Anggota Rumah Tangga (ART) yang berusia di bawah 2 tahun yaitu rentang 0-23 bulan.
- **Fasilitas kesehatan** meliputi RS Pemerintah, RS Swasta, Puskesmas, Pustu, Polindes, dan Tempat praktik tenaga kesehatan.
- **Jaminan kesehatan** adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan. Menurut UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
- **Keluhan kesehatan** adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan lainnya.



Penduduk mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu, perhatian terhadap penduduk tidak hanya menyangkut kuantitasnya, tetapi juga kualitas hidupnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia salah satunya dilakukan melalui peningkatan taraf kesehatan. Faktor kesehatan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kesehatan merupakan salah satu komponen yang diperhatikan dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Jaminan kesehatan yang semakin baik akan meningkatkan kualitas manusia yang baik sehingga meningkatkan produktivitasnya.

Salah satu aspek penting kesejahteraan masyarakat adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Derajat kesehatan penduduk dapat diukur melalui angka kesakitan (*morbidity rate*). Angka kesakitan/morbiditas menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit. Yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, usaha peningkatan dan pemeliharaan mutu pelayanan kesehatan perlu mendapat perhatian. Misalnya melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan peningkatan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik. Tingkat kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tercapai atau tidaknya pembangunan di suatu daerah karena hal tersebut merupakan bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik secara fisik maupun mental. Daerah yang memiliki tingkat derajat kesehatan yang tinggi akan lebih berhasil dalam melaksanakan

pembangunan. Semakin tinggi derajat kesehatan dapat diartikan semakin baik kualitas sumber daya manusia, terlebih bila dihubungkan dengan kesehatan ibu dan anak.

Dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah melakukan berbagai kebijakan dan program, antara lain melalui sosialisasi bidang kesehatan, imunisasi, pemberantasan penyakit menular, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga memberikan jaminan/asuransi kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui BPJS. Semua lapisan masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, murah dan merata sehingga derajat kesehatan masyarakat semakin baik.

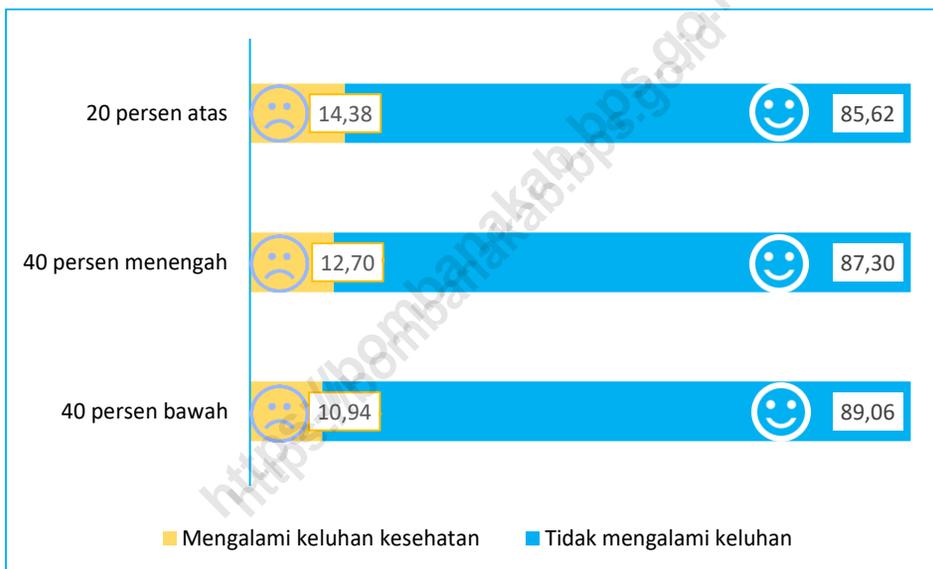
#### 4.1 Status Kesehatan Masyarakat

Status kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh perilaku dan pola konsumsi masyarakat terutama dalam upaya preventif dari berbagai keluhan kesehatan. Perilaku dan pola konsumsi ini berkaitan dengan cara serta kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat menyebabkan terjadi pergeseran pola konsumsi yang secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kesehatan. Salah satu indikator derajat kesehatan yaitu keluhan kesehatan yang dialami masyarakat. Termasuk dalam kategori memiliki keluhan kesehatan, ketika seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut dan kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan lainnya.

Pada tahun 2019, angka kesakitan masyarakat sebesar 12,34 persen. secara keseluruhan jumlah penduduk yang adalah sebesar. Artinya, dari setiap 100 orang penduduk, 12 hingga 13 orang diantaranya mengalami keluhan kesehatan seperti panas, pilek, diare, sakit kepala, maupun penyakit kronis atau keluhan lainnya hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Angka kesakitan ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 14,79 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan penduduk semakin membaik dari tahun sebelumnya.

Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan cenderung lebih banyak yang mengalami keluhan kesehatan yaitu sebesar 12,73 persen dari keseluruhan penduduk perempuan. Sedangkan penduduk laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan adalah sebesar 11,95 persen dari keseluruhan penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki relatif lebih sehat dibanding penduduk perempuan.

**Gambar 4.1. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Kelompok Pengeluaran, 2019**



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

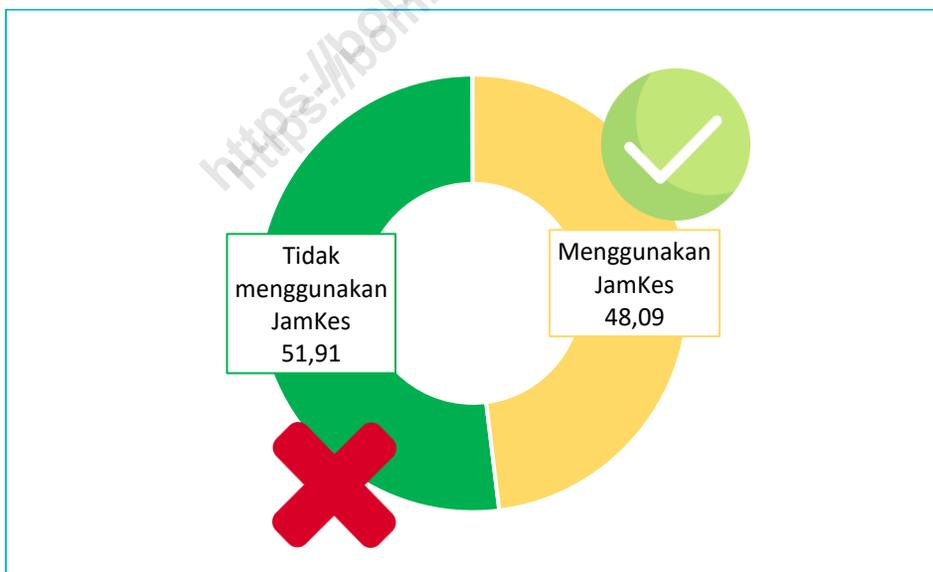
Jika ditinjau berdasarkan kelompok pengeluaran, persentase penduduk 20 persen berpengeluaran tertinggi yang mengalami keluhan kesehatan cenderung lebih banyak dibandingkan dengan kelompok berpengeluaran menengah atau bawah. Fenomena yang ditunjukkan oleh data di atas yaitu semakin rendah pengeluaran suatu kelompok masyarakat, semakin rendah pula angka kesakitan (*morbidity rate*) nya. Fenomena demikian memberikan indikasi adanya pengaruh gaya hidup terhadap status kesehatan masyarakat.

## 4.2 Akses Pelayanan Kesehatan

Beberapa faktor yang biasanya menjadi pertimbangan masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, serta kondisi sosial ekonomi penduduk. Yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya berikut dengan berbagai jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Pembangunan di bidang kesehatan oleh pemerintah mencakup peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Tujuannya tidak lain adalah agar tersedianya fasilitas yang mudah dan murah diakses bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemudahan yang sudah difasilitasi pemerintah salah satunya yaitu jaminan kesehatan. Berikut data mengenai pemanfaatan jaminan kesehatan oleh masyarakat pada tahun 2019.

**Gambar 4.2. Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan, 2019**



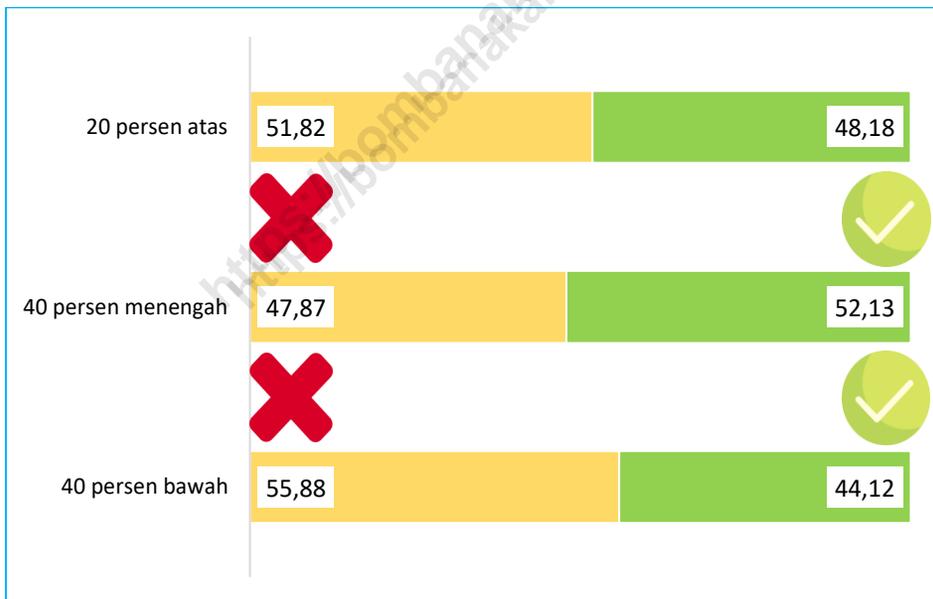
Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Diantara masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan dan pernah berobat jalan, hanya 48 dari setiap 100 penduduk yang memanfaatkan kartu jaminan kesehatan dalam mengakses fasilitas

kesehatan untuk mengatasi keluhan kesehatan yang dialaminya. Lebih dari setengah masyarakat yang berobat jalan tidak menggunakan jaminan kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Ditinjau dari pemanfaatan kartu jaminan kesehatan oleh masyarakat berdasarkan kelompok pendapatannya, terlihat fenomena yang masih belum sesuai dengan harapan. Diantara masyarakat dengan kelompok pendapatan 40 persen terendah yang pernah berobat jalan, hanya 44,12 persen diantara mereka yang menggunakan layanan jaminan kesehatan. Dengan kata lain, 55,88 persen masyarakat lainnya hanya memperoleh layanan kesehatan dengan menyesuaikan kemampuan ekonomi mereka yang tergolong rendah tersebut. Lihat gambar 4.3.

**Gambar 4.3. Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Menurut Kelompok Pengeluaran, 2019**



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Pemanfaatan kartu jaminan kesehatan oleh kelompok masyarakat ekonomi menengah dan tinggi masing-masing yaitu 52,13 dan 48,18 persen. Persentase ini lebih banyak dibandingkan dengan kelompok masyarakat ekonomi bawah.

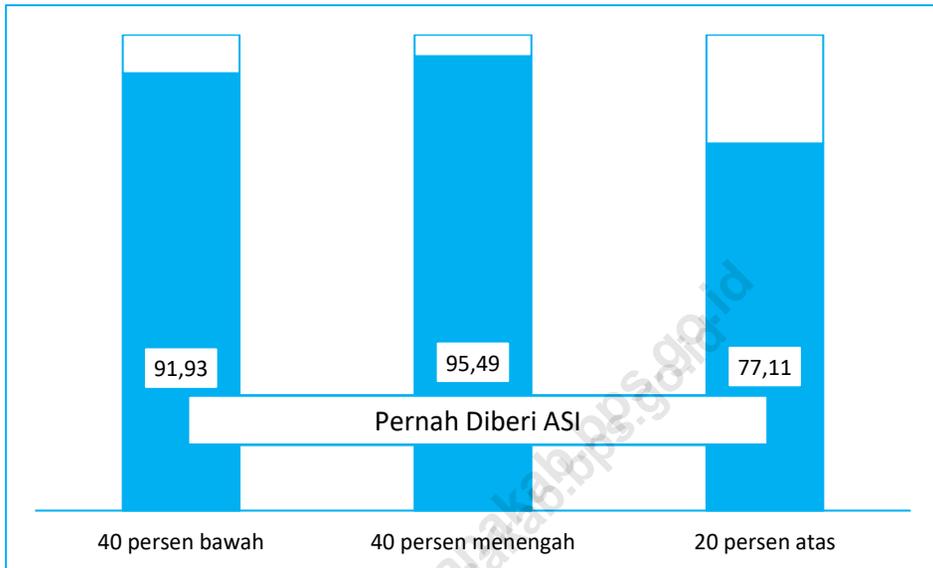
Berdasarkan fenomena tersebut dapat kita maknai bahwa, selain membutuhkan kartu jaminan kesehatan, ada sisi lain yang juga diperlukan masyarakat, yaitu kemudahan akses pemanfaatan jaminan kesehatan yang sudah mereka terima dalam wujud kartu. Ketersediaan dan tersampainya informasi untuk masyarakat mengenai kemudahan penggunaan layanan kesehatan melalui kartu jaminan kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah masih memerlukan perhatian khusus. Hal ini menjadi penting agar segala bentuk bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah tidak hanya tepat sasaran, namun juga tepat guna oleh masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkannya.

#### 4.4 Kesehatan Ibu dan Anak

Ibu yang sedang hamil harus mulai memperhatikan asupan gizi dan juga melakukan imunisasi. Setelah anak lahir sangat dianjurkan untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi serta melindungi tubuh bayi dari alergi dan penyakit infeksi lainnya. Oleh sebab itu pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan setelahnya, tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan/minuman lain. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan keatas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun.

Persentase anak baduta yang pernah diberi ASI sebesar 91,50 persen. Artinya, masih ada 9 dari setiap 100 baduta yang sama sekali tidak pernah mendapatkan ASI. Tidak terlihat adanya perbedaan perlakuan antara bayi laki-laki dan perempuan. Dari 91,50 persen anak yang pernah diberi ASI tersebut, rata-rata lamanya pemberian ASI adalah 10 bulan. Secara umum pemberian ASI telah dilakukan oleh para ibu, namun demikian upaya dukungan pemberian ASI selama 2 tahun tetap harus dilakukan karena berdasarkan survei yang dilakukan, baduta yang menerima ASI secara penuh hingga dua tahun masih relatif sedikit.

**Gambar 4.4. Persentase Baduta yang Diberi Air Susu Ibu Menurut Kelompok Pengeluaran, 2019**

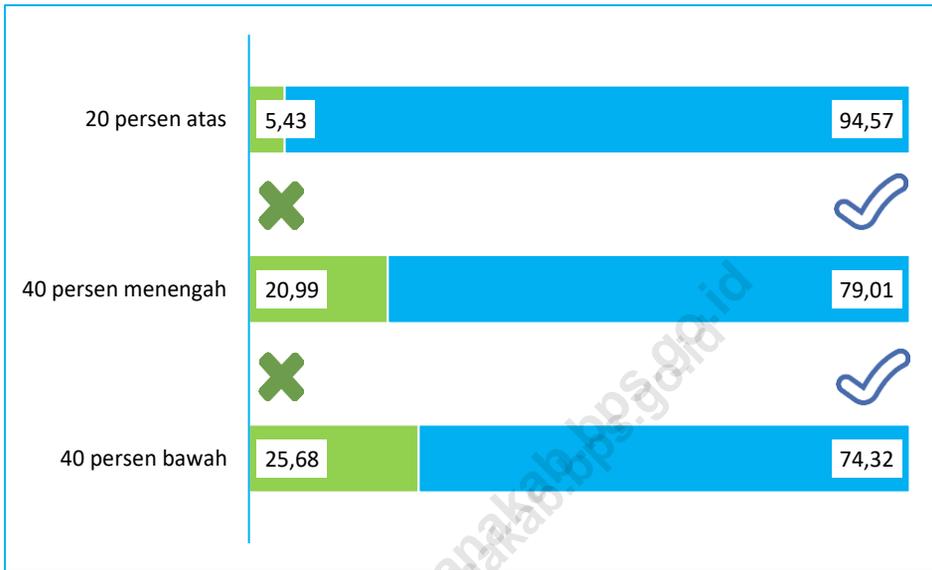


Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Gambar 4.4 di atas menjelaskan perilaku pemberian ASI kepada anak baduta yang dikelompokkan menurut tingkatan ekonomi masyarakat. Fakta yang menonjol terlihat dari grafik tersebut adalah pada pada kelompok masyarakat ekonomi teratas. Dari setiap 100 baduta di kelompok tersebut, hanya 77 anak diantaranya yang mendapatkan ASI, sedangkan 33 anak lainnya tidak pernah mendapat ASI sama sekali.

Buku Kesehatan Anak/Kartu Menuju Sehat merupakan alat untuk mendeteksi secara dini terhadap adanya gangguan atau masalah kesehatan ibu dan anak, sebagai alat komunikasi dan penyuluhan dengan informasi yang penting bagi ibu dan keluarga serta masyarakat mengenai pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk rujukannya dan paket (standar) pelayanan gizi, imunisasi dan tumbuh kembang balita. Penerapan buku KIA secara benar akan berdampak pada peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga akan kesehatan ibu dan anak, menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas serta meningkatkan sistem monitoring, dan informasi kesehatan. Berikut data mengenai kepemilikan buku KIA oleh ibu dan balita di Bombana.

**Gambar 4.5. Persentase Balita yang Memiliki Buku KIA/KMS, Menurut Kelompok Pengeluaran, 2019**



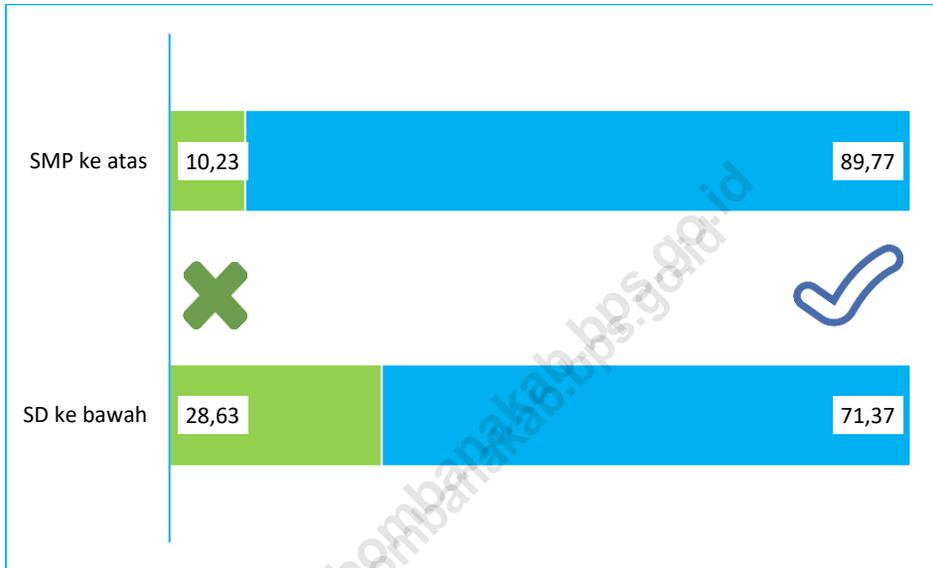
Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Secara keseluruhan, 79,45 persen Ibu dan balita di Bombana memiliki buku KIA, dan 20,55 persen sisanya tidak memiliki. Kepemilikan buku KIA ini signifikan perbedaannya terlihat ketika dilakukan pengelompokan masyarakat menurut kemampuan ekonominya. Semakin baik kondisi ekonomi sebuah keluarga, semakin baik pula akses/kepemilikan mereka akan Buku KIA/KMS atau bisa juga diartikan sebagai kepedulian mereka terhadap kesehatan ibu dan anak yang relatif cukup baik. Pada kelompok ekonomi bawah, 74 dari setiap 100 orang ibu dan anak sudah memiliki buku KIA/KMS, sedangkan sisanya tidak memilikinya. Sangat berbeda ketika kita meninjau masyarakat kelompok ekonomi teratas, dimana hanya 5 dari setiap 100 orang ibu dan anak yang tidak memiliki buku KIA/KMS sebagai buku kontrol kesehatan mereka, sedangkan 95 orang sisanya sudah memilikinya.

Selain itu, pendidikan tertinggi KRT sedikit banyaknya juga memengaruhi kepemilikan masyarakat terhadap buku kontrol kesehatan ibu dan anak (KIA/KMS). Gambar 4.9 berikut menjelaskan fenomena yang terjadi. Ibu dan anak yang tidak memiliki buku KIA/KMS di kelompok masyarakat dengan pendidikan KRT SD ke bawah cukup banyak, yaitu 28 dari setiap 100 ibu dan anak. Sedangkan pada kelompok masyarakat yang

pendidikan KRT nya SMP ke atas, hampir 90 dari setiap 100 orang ibu anak memiliki Buku KIA/KMS.

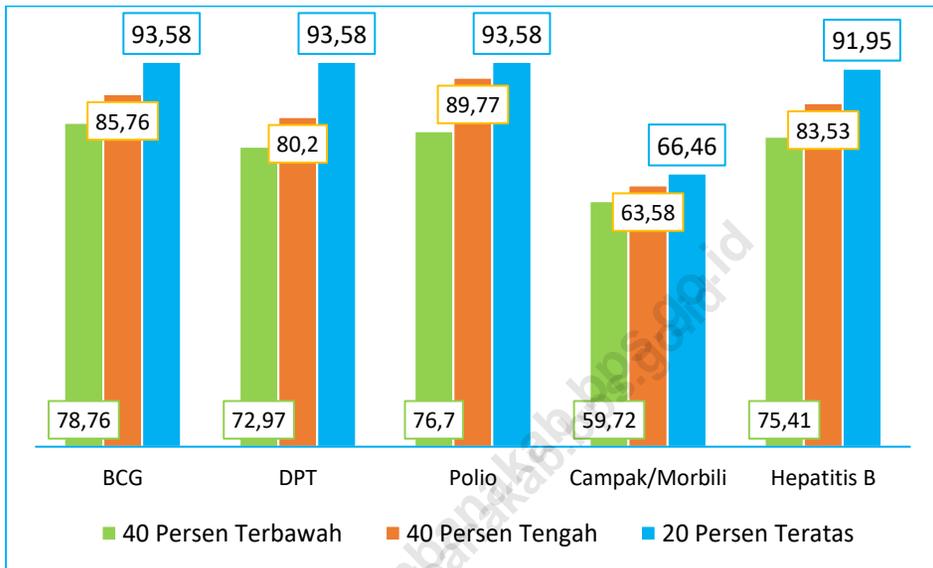
**Gambar 4.6. Persentase Balita yang Memiliki Buku KIA/KMS Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi KRT, 2019**



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap berbagai penyakit. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap diharapkan akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Sesuai dengan pedoman WHO, anak dinyatakan telah diimunisasi lengkap apabila telah mendapatkan satu kali imunisasi BCG, tiga kali imunisasi DPT, tiga kali imunisasi polio, dan satu kali imunisasi campak. Pemberian imunisasi pada balita seharusnya diberikan secara lengkap dan tepat waktu sebelum bayi berumur satu tahun.

**Gambar 4.7. Persentase Balita (umur 0-59 bulan) yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi dan Kelompok Pengeluaran, 2019**



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

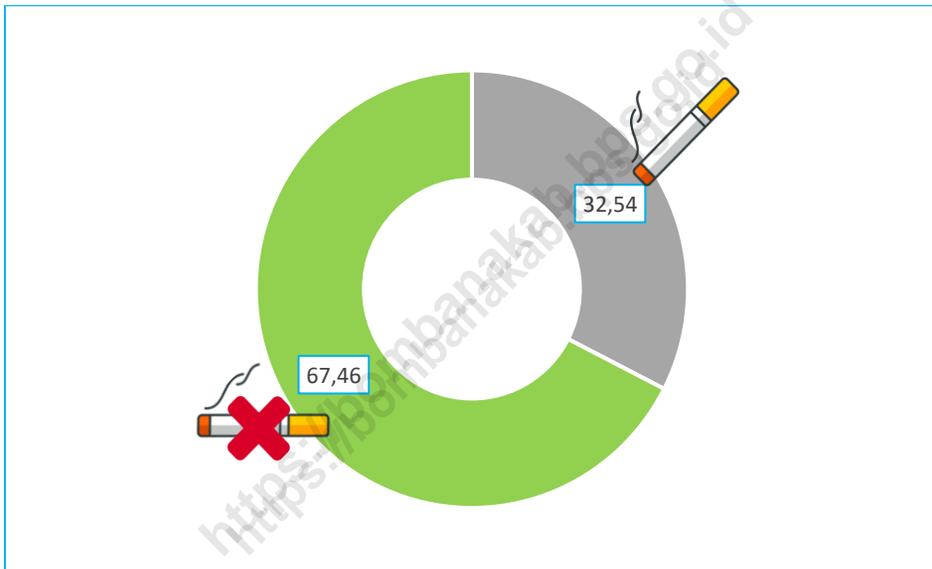
Gambar 4.7 di atas menggambarkan penerimaan imunisasi oleh balita yang dikelompokkan menurut status ekonomi masyarakat. Pola yang sama terlihat untuk semua jenis imunisasi yang seharusnya diterima oleh balita. Kelengkapan imunisasi semakin baik diterima oleh masyarakat kelompok ekonomi teratas. Sedangkan pada kelompok ekonomi bawah, balita yang mendapatkan imunisasi hanya sejumlah 59 sampai 79 persen saja. Artinya ada sekitar 21 sampai 41 orang dari setiap 100 balita di kelompok masyarakat ekonomi bawah yang tidak mendapatkan salah satu atau lebih imunisasi sebagaimana yang disarankan oleh organisasi kesehatan internasional (WHO), yaitu imunisasi BCG, DPT, polio, campak/morbili, dan hepatitis B.

Pemerintah telah mencanangkan program pemberian imunisasi dasar lengkap secara gratis untuk balita. Usia balita merupakan usia paling rentan terhadap berbagai virus dan penyakit. Namun, pada kenyataannya masih 45,35 persen saja balita yang sudah mendapatkan imunisasi lengkap. Meskipun untuk kepemilikan kartu kontrol imunisasi (KIA/KMS) sudah mencapai hampir 80 persen.

### 4.3 Perilaku Merokok

Berbagai masalah kesehatan bisa terjadi pada tubuh seorang perokok. Rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Tak hanya berbahaya bagi si perokok itu sendiri, asap rokoknya pun meningkatkan risiko penyakit bagi perokok pasif atau mereka yang sering terpapar asap rokok.

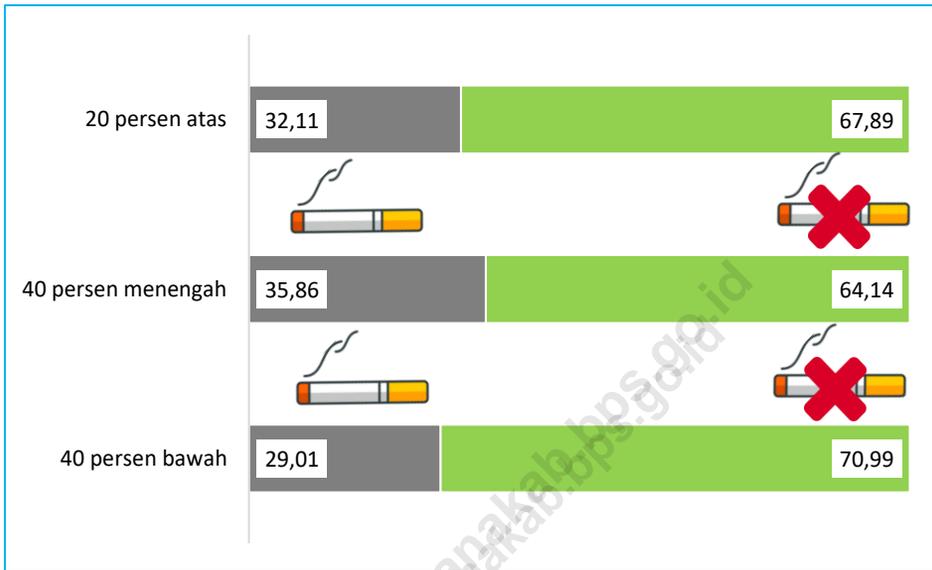
**Gambar 4.8. Perilaku Merokok Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas, 2019**



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Pada tahun 2019 persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok sebanyak 32,54 persen (gambar 4.8). Artinya, dari setiap 100 orang yang berusia di atas 15 tahun, dengan tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, 32 sampai 33 orang diantaranya adalah perokok aktif. Secara sederhananya dapat dikatakan bahwa, sepertiga dari penduduk adalah perokok aktif dengan rata-rata batang rokok yang dihisap sebanyak 107 batang setiap minggunya atau 15 batang setiap harinya. Meskipun peringatan bahaya merokok sudah tertera di setiap bungkus rokok, perilaku merokok masih cukup kental di tengah masyarakat, setidaknya para perokok menghabiskan satu bungkus rokok dalam sehari.

**Gambar 4.9. Perilaku Merokok Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Pengeluaran, 2019**

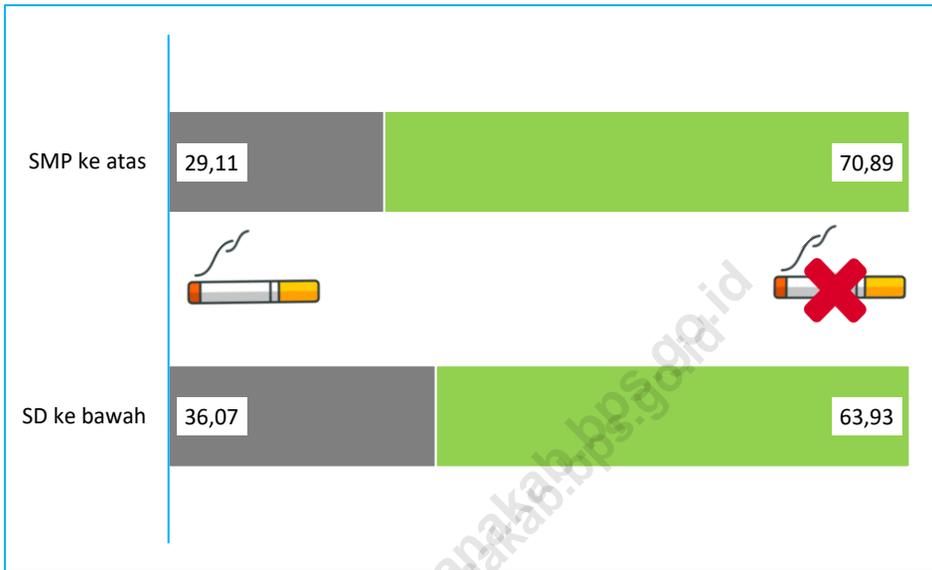


Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Dari gambar 4.9 terlihat perilaku merokok masyarakat yang dikelompokkan menurut tingkat ekonominya. Persentase perokok terbanyak adalah kelompok masyarakat ekonomi menengah, yaitu mencapai 35,86 persen. Sejalan dengan data-data sebelumnya yang menunjukkan pola, semakin tinggi kemampuan ekonomi sebuah keluarga, semakin tinggi pula tingkat pendidikan yang dilaluinya. Dengan demikian, sesuai dengan harapan bahwa semakin baik pula pemahaman mereka terhadap bahaya merokok bagi kesehatan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya.

Pada kelompok masyarakat ekonomi rendah, persentase perokok tidak sebanyak kelompok masyarakat ekonomi menengah. Pada kelompok ini, setidaknya 29 dari setiap 100 orang diantara mereka adalah perokok aktif. Tekanan ekonomi juga turut menekan jumlah perokok. Bagaimana tidak, andai saja mengikuti data rata-rata jumlah rokok yang dihisap para perokok setiap harinya adalah 15 batang, atau setidaknya satu bungkus, maka dengan harga 20.000 saja per bungkusnya para perokok akan menghabiskan biaya sekitar 600.000 rupiah setiap bulannya. Belum lagi harga rokok yang beragam, bisa saja biaya yang dibutuhkan lebih dari itu.

**Gambar 4.10. Perilaku Merokok Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2019**



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Kita juga bisa melihat perilaku merokok masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Dengan tanpa membedakan jenis kelamin, penduduk usia di atas 15 tahun dengan pendidikan tertinggi SD ke bawah cenderung lebih banyak yang merokok, yaitu sebesar 36,07 persen. Sementara penduduk yang merokok dengan tingkat pendidikan tertinggi SMP ke atas sebesar 29,11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin baik pula tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya merokok.

Beberapa institusi sudah menerapkan area bebas asap rokok di lingkungannya. Namun, edukasi mengenai bahaya merokok perlu terus digalakkan, mengingat bahaya jangka panjang yang ditimbulkannya. Apalagi data yang disajikan tersebut adalah penduduk usia 15 tahun ke atas. Dengan demikian, sangat dimungkinkan diantara para perokok tersebut ada yang masih berada di usia sekolah atau bahkan masih bersekolah. Institusi pendidikan berperan cukup besar dalam memberikan pemahaman demikian kepada anak didiknya dan seluruh civitas akademika di lingkungan sekolah.



# PERUMAHAN



5

**85,18 %**  
MEMILIKI RUMAH SENDIRI

**93,66 %**

MENGGUNAKAN  
KLOSET JENIS  
LEHER ANGSA

**91,05 %**  
MEMILIKI TANGKI SEPTIK



## Konsep dan Definisi

- **Sumber air minum** adalah sumber dari air yang digunakan untuk keperluan minum anggota rumah tangga.
- **Air Ledeng** adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM/PDAM/BPAM (Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum/Badan Pengelola Air Minum).
- **Air sumur terlindung** adalah air sumur dengan lingkaran mulut sumur tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit setinggi 0,8 meter di atas tanah, dan sedalam 3 meter di bawah tanah, dan di sekitar mulut sumur ada lantai semen sejauh satu meter dari lingkaran mulut sumur.
- **Air sumur tak terlindung** adalah air sumur dengan lingkaran mulut sumur tersebut tidak dilindungi oleh tembok paling sedikit setinggi 0,8 meter di atas tanah, dan sedalam 3 meter di bawah tanah, dan di sekitar mulut sumur tidak ada lantai semen sejauh satu meter dari lingkaran mulut sumur.
- **Air minum bersih** adalah air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (*septic tank*) > 10 meter.
- **Air minum layak** adalah fasilitas air minum yang dilindungi dari kontaminasi luar khususnya kontaminasi dengan kotoran. Sumber air minum layak meliputi air ledeng, air pipa, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (*septic tank*) > 10 meter, pengumpulan air hujan dan air minum kemasan.

- **Kloset leher angsa** adalah jamban/kakus yang dibawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf “U” (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.

<https://bombanakab.bps.go.id>

Rumah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat selain sandang dan pangan. Tak hanya untuk tempat berlindung, rumah juga berfungsi sebagai tempat tinggal. Oleh karena itu, aspek kesehatan dan kenyamanan bahkan estetika bagi sebagian masyarakat menjadi pertimbangan dalam pemilihan rumah untuk keluarganya. Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketentraman hidup bagi manusia. Kualitas lingkungan rumah tinggal memengaruhi status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Perumahan terkait erat dengan kesehatan. Struktur, lokasi, fasilitas, lingkungan tempat tinggal memiliki pengaruh yang kuat pada keadaan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial. Kondisi dan penggunaan perumahan yang buruk dapat memberikan perlindungan yang lemah terhadap penyakit. Demikian sebaliknya, kondisi perumahan yang layak tidak hanya dapat melindungi orang terhadap bahaya kesehatan tetapi juga mendukung produktivitas ekonomi, kesejahteraan psikologis dan kekuatan sosial.

Selain sebagai tempat tinggal, rumah juga berfungsi sebagai tempat untuk berinteraksi antar anggota rumah tangga dalam suasana yang nyaman dan sehat. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung beberapa fasilitas perumahan yang tersedia, antara lain sarana penerangan yang cukup, air bersih untuk keperluan minum dan masak, serta tersedianya fasilitas jamban yang memenuhi syarat kesehatan. Aksesibilitas anggota rumah tangga terhadap fasilitas perumahan tersebut akan menentukan kualitas rumah tangga yang bermuara pada tingkat kesejahteraan rumah tangga dan derajat kesehatan anggota rumah tangga yang tinggal di dalamnya.

Unsur perumahan merupakan salah satu indikator kesejahteraan bagi pemilikinya. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian individu. Selain itu, kondisi rumah juga memengaruhi produktivitas dan kreativitas kerja seseorang. Rumah memiliki fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya

kualitas kehidupan yang layak melalui pemenuhan kebutuhan papan maka diharapkan akan terwujud kesejahteraan rakyat yang semakin membaik.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 menyatakan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan yang dimaksud adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Beberapa fasilitas perumahan yang dijadikan sebagai indikator untuk mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah status kepemilikan rumah, sumber air minum dan sanitasi. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

## 5.1 Kepemilikan Rumah

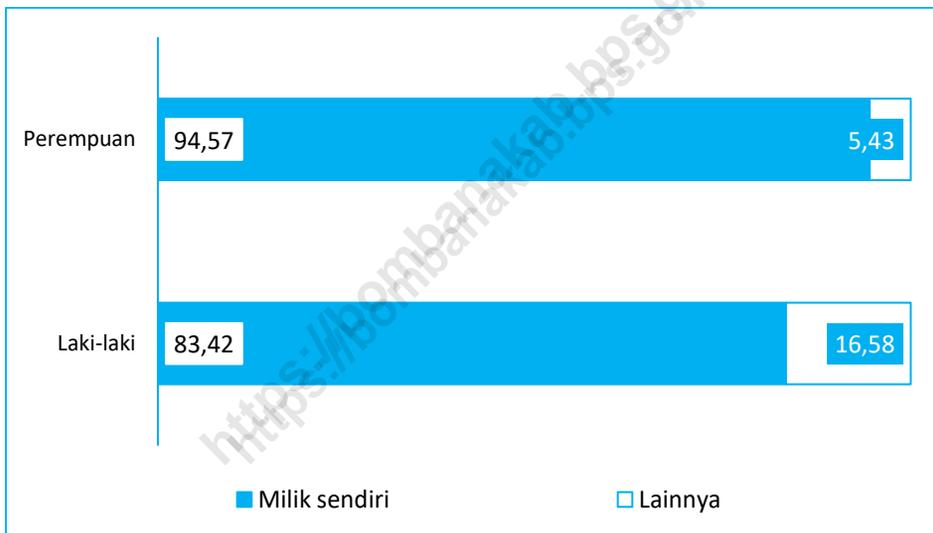
Kondisi ekonomi suatu keluarga akan memberikan pengaruh terhadap status kepemilikan rumah. Mereka yang berpenghasilan lebih tinggi akan mempunyai kesempatan untuk memiliki rumah dengan kondisi yang baik dan permanen. Berbeda halnya dengan keluarga yang berpenghasilan lebih rendah.

Lebih dari itu, status kepemilikan rumah akan berpengaruh pada kualitas rumah. Hal ini disebabkan karena adanya rasa memiliki akan membuat kecenderungan lebih besar untuk senantiasa memperbaiki kualitas rumahnya dibandingkan dengan rumah tangga yang tinggal di rumah dengan status bukan milik sendiri.

Pada tahun 2019, total rumah tangga dengan status kepemilikan rumah milik sendiri sebesar 85,18 persen. Sedangkan 14,82 persen rumah tangga lainnya tinggal di rumah dengan status kontrak/sewa, bebas sewa, rumah dinas, dan lainnya. Mengamati lebih lanjut melalui gambar 5.1, dengan klasifikasi jenis kelamin KRT terlihat bahwa ternyata persentase rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan lebih banyak yang

menempati rumah dengan status milik sendiri, yang itu mencapai 94,57 persen. Sedangkan rumah tangga dengan kepala rumah tangga laki-laki yang menempati rumah dengan status milik sendiri sebanyak 83,42 persen. Banyak faktor yang dimungkinkan sebagai penyebabnya. Salah satunya, rumah tangga yang KRT-nya perempuan cenderung menetap di rumah orang tuanya (warisan). Membutuhkan kajian lebih lanjut untuk memastikan faktor-faktor yang memengaruhinya.

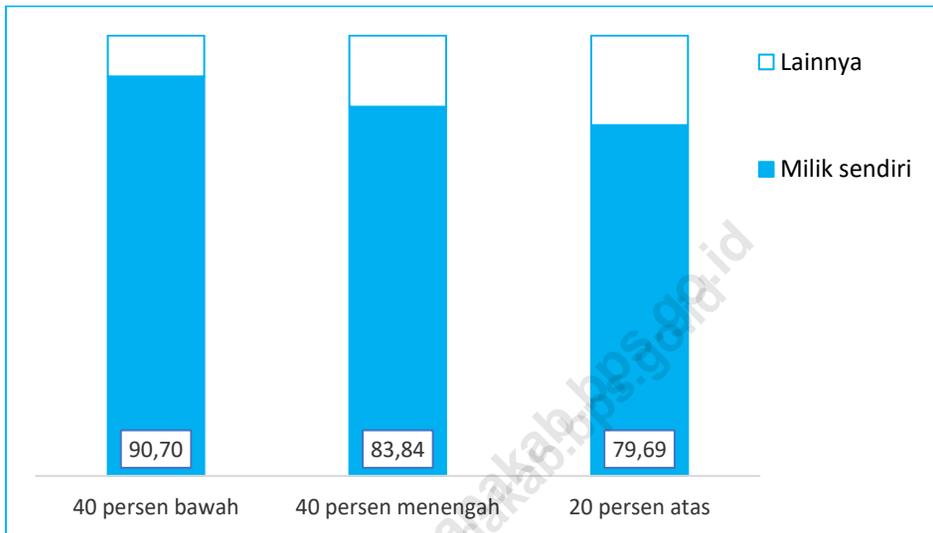
**Gambar 5.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Menurut Jenis Kelamin KRT, 2019**



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Demikian juga ketika diamati melalui karakteristik taraf ekonomi rumah tangga (gambar 5.2), terlihat pola terbalik dari masyarakat pada umumnya. Kepemilikan rumah sendiri lebih banyak pada masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan pada masyarakat dengan ekonomi teratas, hanya 79,69 persen yang menempati rumah berstatus milik sendiri, sisanya boleh jadi menempati rumah kontrakan/sewa atau bebas sewa atau rumah dinas dan lainnya. Umumnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kepemilikan rumah sendiri berasal dari warisan, dimana hal ini tidak dipengaruhi oleh karakteristik tertentu di rumah tangga.

**Gambar 5.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Menurut Kelompok Pengeluaran, 2019**



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

## 5.2 Sumber Air

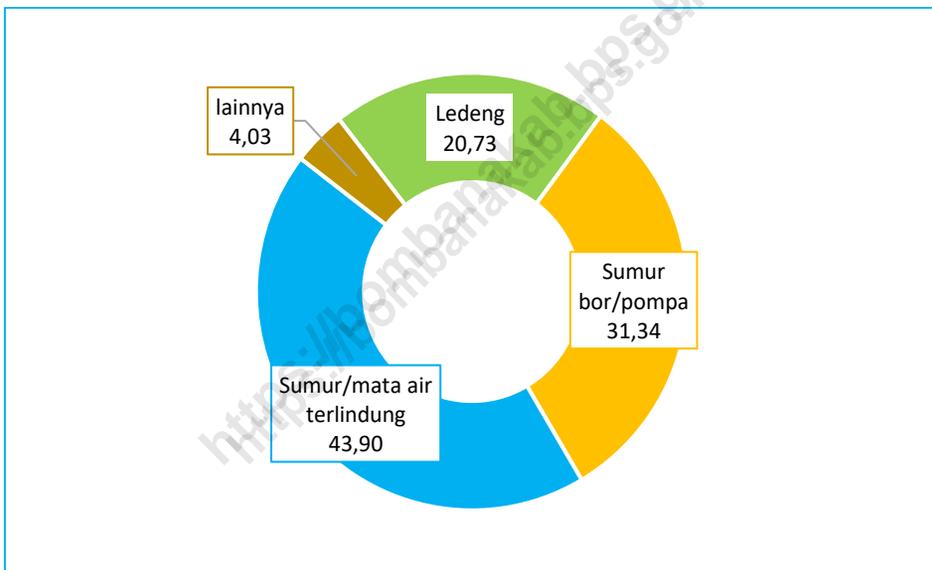
Organisasi Kesehatan Internasional (WHO), menyebutkan bahwa perumahan yang layak harus dapat memberikan perlindungan dari paparan penyakit menular. Salah satunya yaitu melalui pasokan sumber air yang bersih dan sehat.

Air merupakan salah satu kebutuhan vital dalam kelangsungan hidup manusia yang utamanya digunakan untuk minum, memasak, mandi, cuci, dll. Kualitas air yang digunakan berkaitan erat dengan tingkat kesehatan masyarakat. Air yang bersih dan sehat adalah air yang terbebas dari kuman-kuman penyebab penyakit. Bila sumber airnya tercemar oleh kotoran, maka dikhawatirkan air yang dihasilkannya pun akan tercemar.

Ketersediaan air yang cukup untuk setiap rumah tangga menjadi sesuatu yang penting dalam memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar. Sumber air yang digunakan sangat bervariasi bergantung pada ketersediaan akses serta kondisi sosial, ekonomi, dan letak geografis rumah tangga tersebut. Kelayakan air yang dikonsumsi rumah tangga juga

perlu mendapat perhatian karena berhubungan langsung dengan tingkat kesehatan anggota rumah tangga. Keberadaan sumber air dengan jarak yang terlalu dekat dengan tempat penampungan tinja/limbah/kotoran membuka peluang tercemarnya air tersebut oleh sumber penyakit yang menyebar melalui perantara kotoran atau perantara air. Sumber air yang utamanya digunakan untuk minum dan memasak dapat dikatakan aman dari kontaminasi jika berjarak minimal 10 meter dari tempat penampungan tinja/limbah/kotoran terdekat.

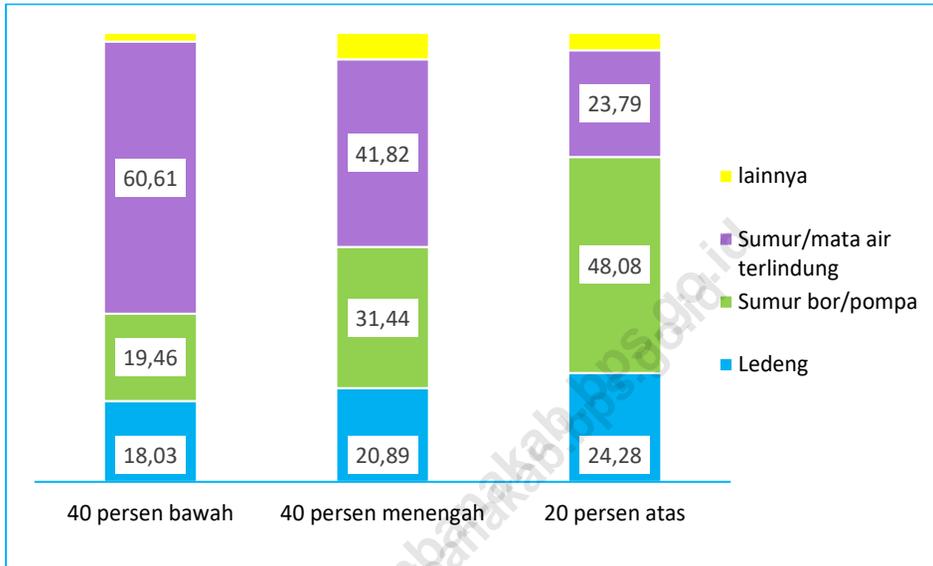
**Gambar 5.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air yang Digunakan Untuk Memasak/Mandi/cuci/lainnya, 2019**



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Sumber air terbanyak yang digunakan oleh penduduk adalah sumur/mata air terlindung, yaitu mencapai 43,90 persen rumah tangga. Selanjutnya, sumber air terbanyak berikutnya yaitu sumur bor/pompa sebanyak 31,34 persen, diikuti dengan air ledeng 20,73 persen. Diantara sumber air lainnya yang digunakan oleh 4,03 persen masyarakat adalah sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi), dan air hujan.

**Gambar 5.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Pengeluaran dan Sumber Air yang Digunakan Untuk Memasak/Mandi/cuci/lainnya, 2019**



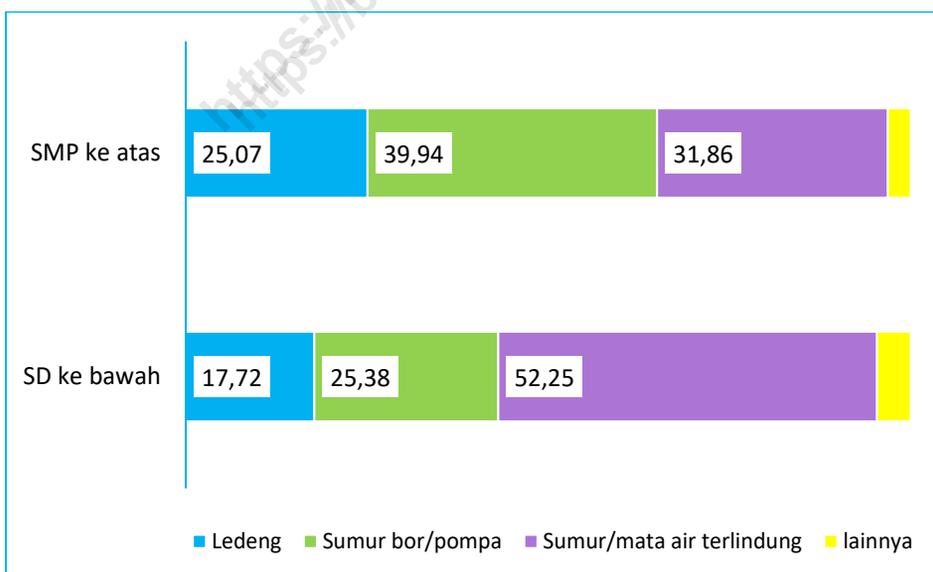
Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Sumber air yang dipilih masyarakat sebagai yang utama untuk rumah tangganya sedikit banyaknya dipengaruhi oleh kondisi ekonominya. Terlihat pada gambar 5.4, pada masyarakat kelompok pengeluaran 40 persen terbawah, hanya 18 dari setiap 100 rumah tangga yang menggunakan air ledeng (PDAM). Persentase pengguna air ledeng meningkat seiring meningkatnya level ekonomi masyarakat, pada kelompok menengah, hampir 21 dari setiap 100 rumah tangga menggunakan air ledeng, dan pada kelompok masyarakat ekonomi teratas, 24,28 persen menggunakan air ledeng sebagai sumber air memasak/mandi/cuci/dll. Hal ini dikarenakan, sumber air ledeng umumnya berbayar per banyaknya penggunaan oleh rumah tangga.

Pada kelompok masyarakat ekonomi bawah, paling banyak dari mereka menggunakan sumur/mata air terlindung untuk keperluan memasak/mandi/cuci/dsb yaitu 60,61 persen, melebihi separuhnya dari keseluruhan rumah tangga di kelompok tsb. Demikian pula pada kelompok ekonomi menengah, terbanyak dari mereka menggunakan sumur/mata air terlindung untuk keperluan memasak/mandi/cuci/dsb yaitu 41,82 persen. Perilaku yang berbeda terlihat pada kelompok masyarakat ekonomi teratas, penggunaan sumber air untuk keperluan memasak/mandi/cuci/dsb terbanyak adalah menggunakan sumur bor/pompa yaitu 48,08 persen, hampir mencapai setengahnya dari seluruh rumah tangga di kelompok tersebut.

Bagaimana dengan karakteristik pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh kepala rumah tangga? Apakah membentuk pola tertentu ketika disandingkan dengan data sumber air yang digunakan untuk memasak/mandi/cuci/dsb? Berikut uraiannya pada gambar 5.5.

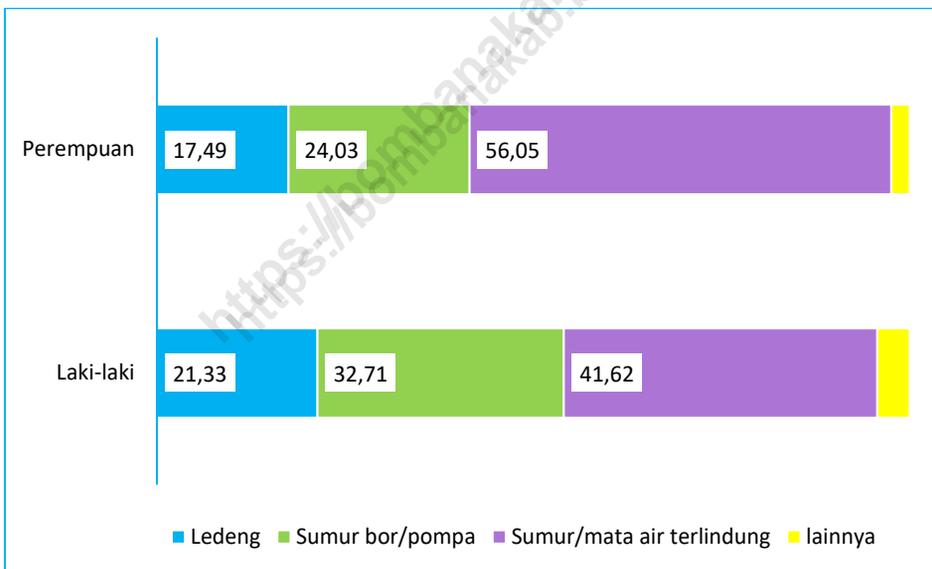
**Gambar 5.5. Persentase Rumah Tangga Menurut Pendidikan Tertinggi KRT dan Sumber Air yang Digunakan Untuk Memasak/Mandi/cuci/lainnya, 2019**



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Pada gambar di atas terlihat kecenderungan pilihan sumber air yang digunakan rumah tangga berkaitan dengan pendidikan tertinggi kepala rumah tangganya. Rumah tangga dengan pendidikan tertinggi KRT nya SD ke bawah, terdapat sekitar 52 dari setiap 100 rumah tangga yang menggunakan sumur/mata air terlindung sebagai pemenuhan kebutuhan memasak/mandi/cuci/dll rumah tangga tersebut. Pada rumah tangga yang dipimpin oleh KRT dengan pendidikan tertinggi SMP ke atas, terlihat persentase yang tidak jauh berbeda antara penggunaan sumber air ledeng, sumur bor/pompa, dan sumur/mata air terlindung. Yaitu secara berturut-turut 25,07 persen; 39,94 persen; dan 31,86 persen. Penggunaan terbanyak adalah pada sumber air dari sumur bor/pompa.

**Gambar 5.6. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin KRT dan Sumber Air yang Digunakan Untuk Memasak/Mandi/cuci/lainnya, 2019**



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

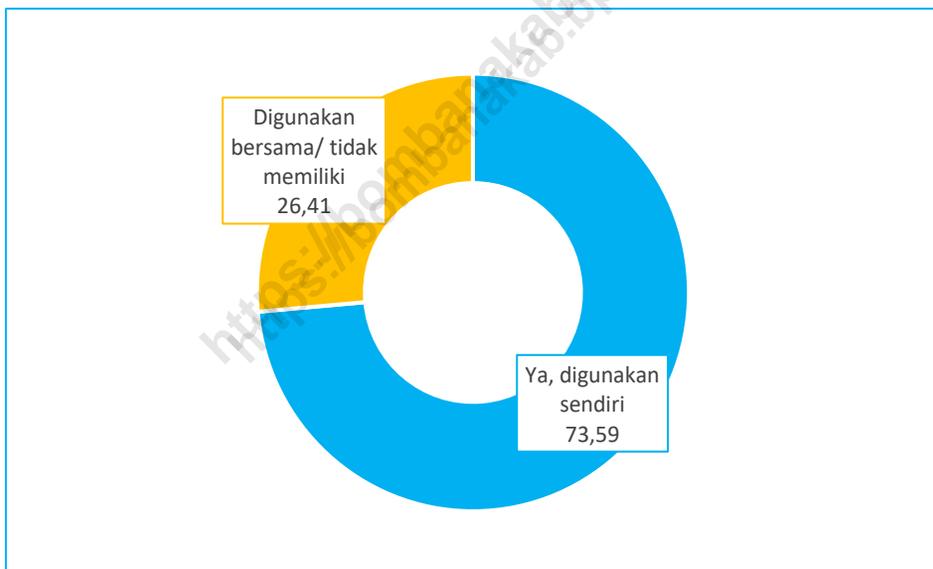
Sumber air minum yang digunakan masyarakat juga bisa dilihat melalui karakteristik jenis kelamin kepala rumah tangga. Persentase rumah tangga pengguna air ledeng sebagai sumber utama untuk pemenuhan kebutuhan memasak/mandi.cuci/dll rumah tangganya dari air ledeng dan sumur bor/pompa lebih banyak pada rumah tangga yang KRT nya berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan rumah tangga dengan sumber utama air untuk memasak dll nya dari sumur/mata air terlindung lebih banyak

persentase penggunaannya pada kelompok rumah tangga yang KRT nya perempuan.

### 5.3 Sanitasi

Diantara infrastruktur dasar rumah tangga adalah air bersih, listrik, gas, dan pembuangan limbah rumah tangga atau sanitasi. Sebuah rumah tangga dikategorikan memiliki akses fasilitas sanitasi yang layak apabila rumah tangga tersebut minimal memiliki fasilitas buang air besar sendiri atau bersama, jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik.

**Gambar 5.7. Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2019**



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Selain itu juga akan menyebabkan berbagai penyakit seperti tipus, disentri, kolera, dan sebagainya. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan

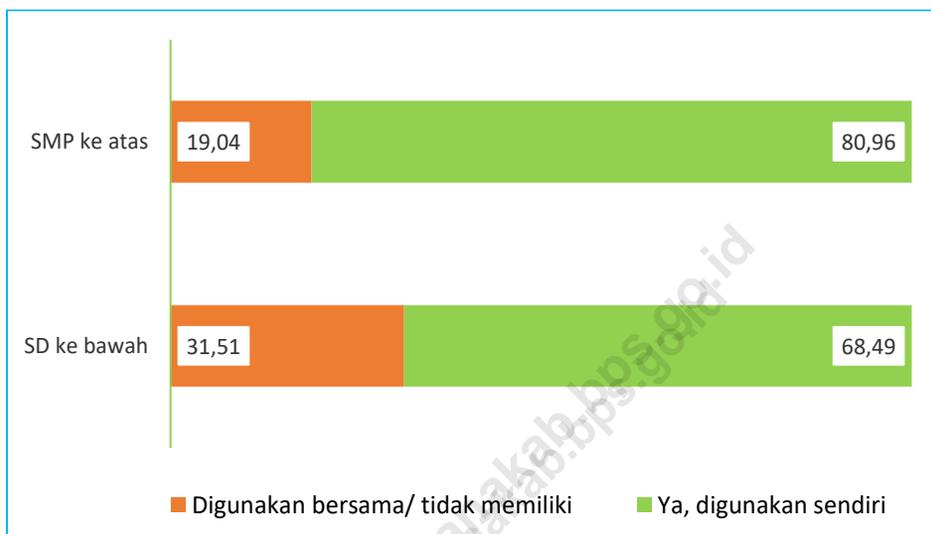
baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Pada tahun 2019, sebagian besar rumah tangga sudah menggunakan fasilitas buang air (jamban) sendiri, yaitu sebesar 73,59 persen. Secara umum, sudah banyak terlihat kemajuan berkaitan dengan fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh masyarakat. Meskipun persentase rumah tangga yang menggunakan MCK dengan fasilitas digunakan bersama/umum atau tidak menggunakan jamban sudah menurun, angkanya masih cukup besar yaitu 26,41 persen. Hal ini berarti setiap 100 rumah tangga, setidaknya 26 diantaranya masih belum memiliki fasilitas tempat buang air sendiri. Kondisi ini tentunya membutuhkan perhatian masyarakat dan pemerintah setempat, mengingat pentingnya kebersihan sanitasi untuk menciptakan masyarakat dengan lingkungan yang sehat dan terbebas dari penyakit.

Kepedulian masyarakat terhadap ketersediaan fasilitas sanitasi di rumah tangganya, juga dipengaruhi oleh pendidikan tertinggi yang ditamatkan KRT. Ketika rumah tangga dikelompokkan menjadi dua berdasarkan pendidikan tertinggi KRT nya, maka diperoleh informasi sebagaimana tersaji dalam gambar 5.8 di atas.

Terlihat pola yang menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan KRT, maka semakin besar pula kepedulian mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar sanitasi. Pada kelompok rumah tangga dengan pendidikan tertinggi KRT SD atau di bawahnya baru sekitar 68,49 persen yang memiliki fasilitas buang air besar, sedangkan 31,51 persen lainnya masih menggunakan fasilitas bersama/umum atau tidak menggunakan jamban. Kepemilikan fasilitas sanitasi ini membaik seiring meningkatnya pendidikan tertinggi KRT sebagaimana pada kelompok kedua yaitu, rumah tangga dengan KRT berpendidikan SMP ke atas. Pada setiap 100 rumah tangga, 80,96 persen diantaranya sudah memiliki fasilitas jamban yang digunakan sendiri oleh rumah tangga ybs.

**Gambar 5.8. Persentase Rumah Tangga Menurut Pendidikan Tertinggi KRT dan Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2019**

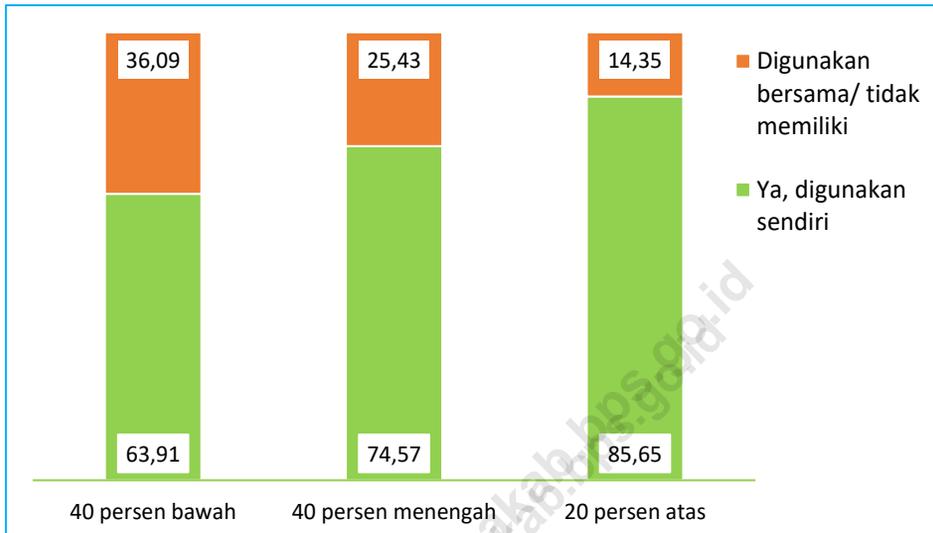


Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Ketersediaan fasilitas sanitasi ini tentu juga dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi rumah tangga. Semakin baik kemampuan ekonomi suatu rumah tangga, semakin baik pula kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan akan infrastruktur dasar rumah tangga tersebut. Pada kelompok rumah tangga ekonomi bawah, masih ada 36,09 persen rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar yang digunakan sendiri. Angka ini menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana persentase rumah tangga kelompok yang sama yang belum memiliki fasilitas sanitasi sendiri sebanyak 48,29 persen.

Melihat kelompok rumah tangga ekonomi menengah, dari setiap 100 rumah tangga, 25 diantaranya belum memiliki fasilitas buang air besar yang digunakan sendiri. Demikian pada kelompok rumah tangga ekonomi teratas, sekitar 85,65 persen rumah tangga sudah memiliki fasilitas buang air besar yang digunakan sendiri.

**Gambar 5.9. Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Pengeluaran dan Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2019**



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

# KONSUMSI DAN PENGELUARAN

# 6



RATA-RATA PENGELUARAN PERKAPITA SEBULAN  
MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN (RUPIAH)

20 PERSEN TERATAS  
RP. 2.332.707,-

40 PERSEN TENGAH  
RP. 917.022,-

40 PERSEN TERBAWAH  
RP. 384.328,-





## Konsep dan Definisi

- **Konsumsi/pengeluaran rumah tangga** adalah jumlah uang yang digunakan untuk keperluan rumah tangga (makanan dan nonmakanan) yang benar-benar di konsumsi (dimakan/dipakai) atau dibayarkan tanpa memperhatikan asal barang baik dari pembelian/produksi maupun pemberian/pembagian.
- **Konsumsi kalori dan protein** dihitung dengan mengalikan kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan nilai kandungan kalori dan protein setiap jenis makanan berdasarkan daftar konversi zat gizi.
- **Rata-rata pengeluaran Perkapita per bulan** diperoleh dengan membagi jumlah seluruh pengeluaran rumah tangga dengan jumlah seluruh anggota rumah tangga.



Taraf dan pola konsumsi merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat. Penghitungan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat menggunakan pendekatan pengeluaran perkapita per bulan atau per tahun. Pendekatan ini digunakan agar data yang diperoleh lebih representatif sehingga mampu menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Karena pada umumnya, responden sungkan menjelaskan mengenai pendapatan yang diterimanya secara menyeluruh.

## 6.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan nonmakanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi. Kelompok bukan makanan mencakup perumahan, pakaian, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dsb. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan.

Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Berikut disajikan data mengenai rata-rata pengeluaran makanan dan bukan makanan pada setiap kelompok ekonomi masyarakat.

**Tabel 6.1. Rata-Rata Pengeluaran untuk Makanan dan Bukan Makanan Perkapita Sebulan menurut Kelompok Pengeluaran, 2019**

Kelompok Pengeluaran	Makanan	Bukan makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
40% Terbawah	221 359	162 969	384 328
40% Tengah	483 398	433 624	917 022
20% Teratas	859 603	1 473 104	2 332 707
Rata-rata pengeluaran Perkapita	454 593	533 867	988 460

Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Tabel 6.1 diatas menyajikan data pengeluaran rata-rata perkapita sebulan masyarakat pada tahun 2019. Dari tabel tersebut diperoleh informasi bahwa rata-rata pengeluaran masyarakat pada kelompok pengeluaran terendah per orang per bulannya adalah 384.328 rupiah. Nominal pengeluaran ini terus meningkat seiring dengan semakin besarnya rata-rata pengeluaran masyarakat di masing-masing kelompoknya. Hingga pada kelompok pengeluaran tertinggi, rata-rata biaya yang dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan nonmakanan masyarakat perkapita perbulan mencapai 2.332.707 rupiah.

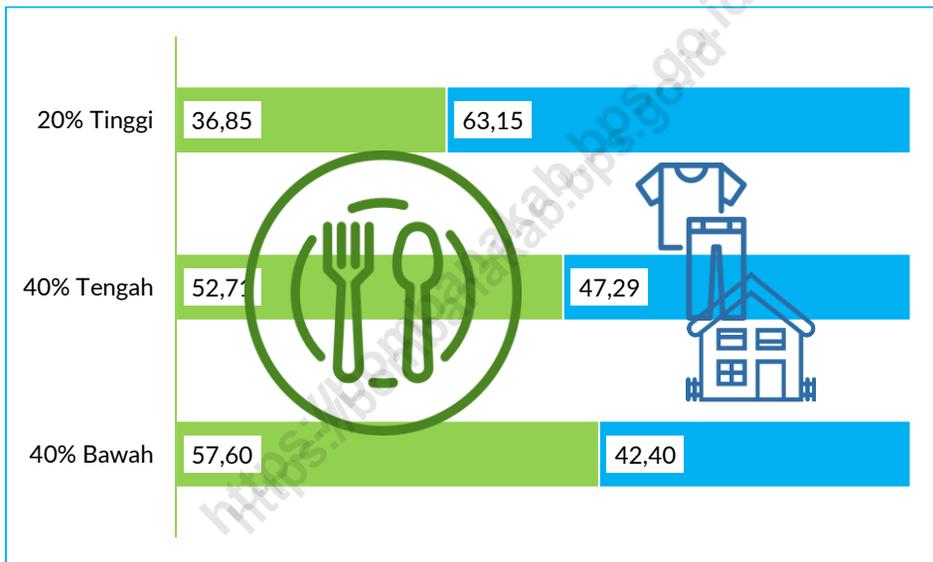
Secara keseluruhan, rata-rata pengeluaran masyarakat per kapita meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun sayangnya, ketika diamati pada masing-masing kelompok, peningkatan tersebut tidak merata terjadi di seluruh kelompok masyarakat. Peningkatan hanya terjadi pada masyarakat ekonomi menengah dan tinggi. Yaitu masing-masingnya mengalami peningkatan dari 855.124 rupiah menjadi 917.022 rupiah; dan pada kelompok ekonomi teratas pada tahun 2018 memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan sebesar 1.920.160 rupiah dan meningkat menjadi 2.332.707 rupiah pada tahun 2019.

Sedangkan pada kelompok masyarakat ekonomi bawah justru mengalami penurunan, yaitu dari rata-rata pengeluaran perkapita perbulannya 408.571 rupiah pada 2018 menjadi 384.328 rupiah pada 2019. Fenomena ini perlu menjadi perhatian bersama, mengingat adanya

indikasi penurunan kemampuan ekonomi pada kelompok masyarakat ekonomi bawah.

Lebih spesifik mengenai proporsi pengeluaran antara makanan dan nonmakanan di setiap kelompok pengeluaran masyarakat, dapat diamati melalui Gambar 6.1.

**Gambar 6.1. Rata-rata Pengeluaran untuk Makanan dan Nonmakanan Perkapita Perbulan Menurut Kelompok Pengeluaran (persen), 2019**



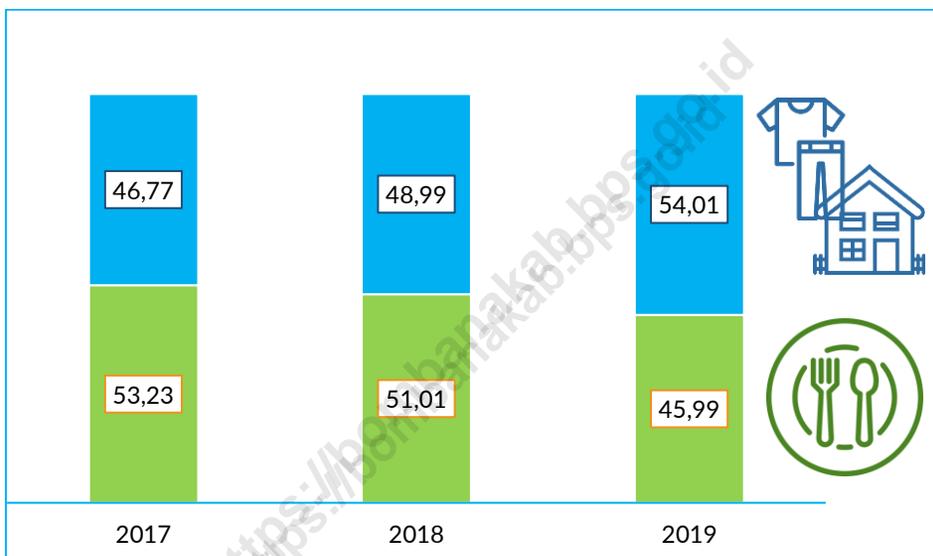
Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Dari diagram tersebut semakin jelas terlihat mengenai pola konsumsi masyarakat. Semakin tinggi kelompok pengeluaran (20 persen pengeluaran tertinggi), maka semakin besar pula proporsi pengeluaran barang dan jasa nonmakanan nya. Pada kelompok terendah, dari rata-rata pengeluaran sebesar 384.328 rupiah per orang per bulan, sebesar 57,60 persennya dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya berupa makanan. Sedangkan pada kelompok pengeluaran tertinggi, dari rata-rata pengeluaran 2.332.707 rupiah perorang perbulan, sebesar 63,15 persennya dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan nonmakanan.

Untuk melihat perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat selama tiga tahun terakhir, dapat diamati melalui perubahan pola konsumsi

makanan dan nonmakanan masyarakatnya. Semakin meningkat proporsi pengeluaran untuk nonmakanan, diasumsikan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, mengingat sudah terpenuhinya seluruh kebutuhan makanan yang merupakan kebutuhan pokok yang mesti terpenuhi. Berikut disajikan pada Gambar 6.2 berikut.

**Gambar 6.2. Persentase Pengeluaran Perkapita per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2017 - 2019**



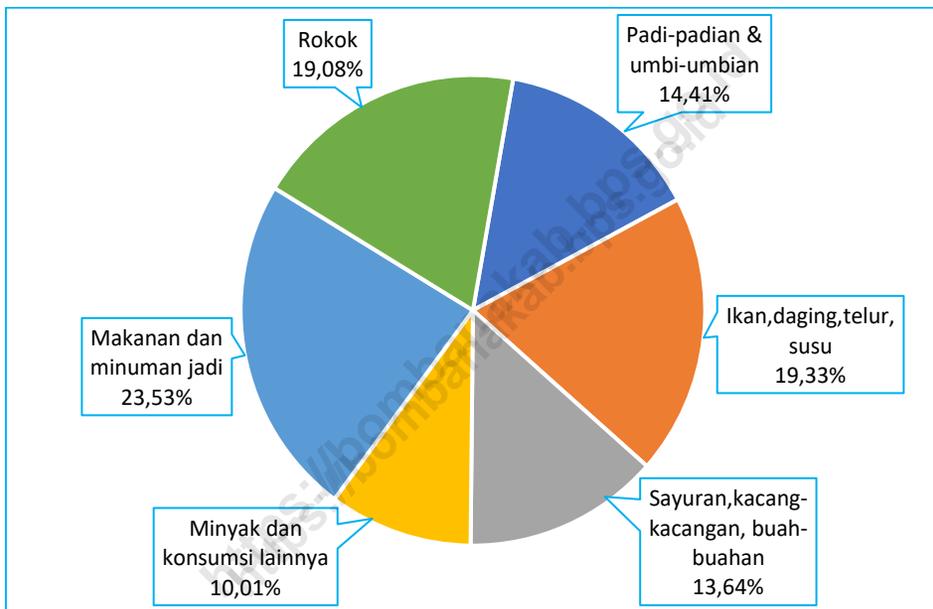
Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Bila dilihat persentasenya, pada tahun 2017 dan 2018, proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan makanan di masyarakat masih mendominasi, yaitu lebih dari setengah total pengeluaran digunakan untuk makanan. Namun berbeda dengan tahun 2019, konsumsi bukan makanan menjadi lebih dominan, yaitu mencapai 54,01 persen dari total konsumsi masyarakat.

Secara lebih spesifik mengenai proporsi pengeluaran masing-masing jenis komoditas terhadap total konsumsi makanan masyarakat pada tahun 2019 disajikan dalam gambar 6.3. Dapat kita amati bahwa, sebesar 14,41 persen dari total pengeluaran makanan yang dikeluarkan adalah untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok seperti padi-padian dan umbi-umbian. Untuk memenuhi kebutuhan akan protein seperti ikan, daging, telur, dan susu, menghabiskan proporsi pengeluaran sebesar 19,33

persen. Dengan proporsi yang relatif hampir sama, rata-rata konsumsi masyarakat untuk rokok adalah sebesar 19,08 persen. Konsumsi yang memiliki proporsi terbesar terhadap total pengeluaran makanan masyarakat adalah untuk makanan dan minuman jadi yaitu mencapai 23,53 persen.

**Gambar 6.3. Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Kelompok Makanan, 2019**



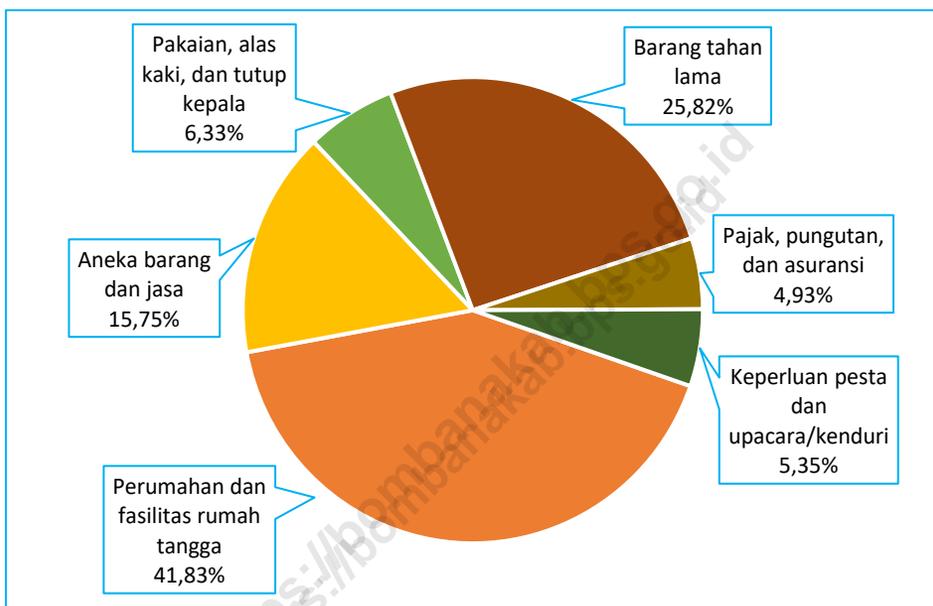
Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Konsumsi kelompok bukan makanan masyarakat secara umum, 41,83 persennya digunakan untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga seperti listrik, air, bahan bakar, dan kendaraan bermotor. Proporsi terbesar berikutnya adalah untuk barang tahan lama yaitu sebesar 25,82 persen. Barang tahan lama mencakup perlengkapan perabot rumah tangga, alat-alat dapur, perhiasan, alat elektronik rumah tangga, dll.

Pengeluaran untuk barang dan jasa seperti perlengkapan kosmetik, biaya kesehatan, pendidikan, dan transportasi memiliki proporsi sebesar 15,75 persen dari total pengeluaran kebutuhan bukan makanan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan sandang berupa pakaian, menghabiskan 6,33 persen dari total pengeluaran nonmakanan, sisanya

adalah biaya pajak, pungutan, dan asuransi serta keperluan pesta dan upacara adat yang masing-masing memiliki proporsi 4,93 persen dan 5,35 persen. Informasi lebih lengkap dapat diamati melalui gambar 6.4.

**Gambar 6.4. Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Kelompok Bukan Makanan, 2019**



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Secara teori ekonomi, semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk akan semakin tinggi pula persentase atau porsi pengeluaran yang dibelanjakan untuk barang bukan makanan dan semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan. Berkaitan dengan teori tersebut, untuk mengamati fenomena yang terjadi di Kabupaten Bombana, disajikan data rata-rata pengeluaran perkapita masyarakat selama sebulan menurut jenis pengeluaran dan kelompok pengeluaran perkapita.

Pada kelompok pengeluaran masyarakat 40 persen terendah, konsumsi makanan yang terbesar terhadap seluruh pengeluaran adalah untuk konsumsi padi-padian yang merupakan makanan pokok masyarakat yaitu mencapai 12,29 persen. Selanjutnya diikuti oleh konsumsi makanan dan minuman jadi yang menghabiskan 10,90 persen dari total pengeluaran. Dan pada urutan ketiga yaitu konsumsi rokok sebesar 10,28 persen.

**Tabel 6.2. Persentase Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran dan Kelompok Pengeluaran Sebulan, 2019**

Kelompok Barang	Kelompok Pengeluaran			
	40 % terbawah	40 % tengah	20 % teratas	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Makanan</b>	<b>57,60</b>	<b>52,71</b>	<b>36,85</b>	<b>45,99</b>
Padi-padian	12,29	7,57	3,57	6,42
Umbi-umbian	0,18	0,26	0,19	0,21
Ikan/Undang/Cumi/Kerang	7,87	6,56	4,68	5,87
Daging	0,12	0,61	0,74	0,60
Telur & susu	2,67	2,37	2,38	2,42
Sayur-sayuran	3,52	2,97	1,74	2,47
Kacang-kacangan	0,43	0,57	0,28	0,41
Buah-buahan	2,54	3,40	3,67	3,39
Minyak & lemak	1,56	1,20	0,66	1,00
Bahan minuman	2,25	1,72	0,95	1,44
Bumbu-bumbuan	1,47	1,19	0,77	1,04
Konsumsi Lainnya	1,50	1,22	0,92	1,12
Makanan & minuman jadi	10,90	12,11	9,77	10,82
Rokok	10,28	10,97	6,54	8,77
<b>Nonmakanan</b>	<b>42,40</b>	<b>47,29</b>	<b>63,15</b>	<b>54,01</b>
Perumahan & Fasilitas RT	23,05	24,06	21,27	22,59
Aneka brg & jasa	8,40	9,36	7,86	8,50
Pakaian, alas kaki & tutup kepala	3,24	3,70	3,25	3,42
Barang tahan lama	3,50	7,04	22,85	13,94
Pajak, pungutan & asuransi	4,02	2,59	2,28	2,66
Keperluan pesta & upacara/kenduri	0,20	0,52	5,64	2,89
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Pola yang berbeda terlihat pada kelompok masyarakat berpengeluaran menengah dan tinggi. Dimana porsi pengeluaran untuk makanan tidak lagi didominasi oleh komoditas padi-padian, namun sudah bergeser ke makanan dan minuman jadi. Porsi pengeluaran untuk makanan pada kelompok berpengeluaran menengah dan kelompok berpengeluaran tinggi secara berturut-turut yaitu 12,11 persen dan 9,77 persen. Komoditas makanan berikutnya yang terbesar porsi konsumsinya oleh masyarakat berpengeluaran menengah dan tinggi adalah untuk rokok, yaitu masing-masing 10,97 persen dan 6,54 persen. Pada kelompok 40 persen masyarakat berpengeluaran menengah, komoditi padi-padian menempati porsi ketiga terbanyak yang dikonsumsi. Sedangkan pada kelompok ekonomi teratas, komoditi makanan terbanyak ketiga yang dikonsumsi adalah berbagai jenis ikan/udang/cumi/kerang/biota laut lainnya.

Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa ada kemiripan pola konsumsi di semua kelompok pengeluaran. Konsumsi rokok di tengah masyarakat menjadi fenomena yang umum kita temui. Dan dari data di atas terlihat bahwa, proporsi pengeluaran untuk rokok hampir setara dengan konsumsi makanan kebutuhan pokok seperti padi-padian. Bahkan di kelompok masyarakat menengah ke atas ada masyarakat yang seolah-olah menjadikan rokok sebagai kebutuhan utamanya, yang terlihat dari proporsi pengeluaran rokok menjadi yang lebih besar dibandingkan dengan konsumsi makanan pokok (padi-padian).

Konsumsi barang dan jasa (bukan makanan) masyarakat umumnya proporsi terbesar adalah untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Pola yang mencolok terlihat pada konsumsi kelompok barang tahan lama. Semakin tinggi tingkat pengeluaran masyarakat (kelompok pengeluaran terendah hingga tertinggi), semakin besar proporsi pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang tahan lama seperti meubelair, perlengkapan perabotan rumah tangga, perhiasan, dsb.

Pada kelompok 40 persen masyarakat berpengeluaran terendah, hanya 3,50 persen pengeluaran yang digunakan untuk barang tahan lama ini. Proporsinya terus meningkat hingga pada kelompok 40 persen masyarakat berpengeluaran menengah, sebesar 7,04 persen dari

pengeluaran yang digunakan. Sangat berbeda dengan kelompok masyarakat dengan pengeluaran terbesar, untuk memenuhi kebutuhan akan barang tahan lama, kelompok masyarakat ini menghabiskan 22,85 persen dari total pengeluarannya atau lebih seperlima dari seluruh pengeluaran makanan maupun nonmakanan yang mereka konsumsi.

## 6.2 Konsumsi Kalori dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2014), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein. Berikut data hasil Susenas 2019 mengenai konsumsi kalori dan protein perkapita perhari oleh masyarakat dikelompokkan menurut kelompok pengeluaran perkapita selama satu bulan.

Rata-rata konsumsi kalori penduduk sebesar 2.077,73 kkal. Dengan demikian, rata-rata konsumsi kalori per hari di tahun 2019 secara total belum memenuhi syarat kecukupan gizi yang ditentukan yaitu 2.150 kkal. Sebagaimana lazimnya di tengah masyarakat, konsumsi kalori terbesar perkapita perhari berasal dari konsumsi padi-padian. Sayangnya, proporsi konsumsi komoditas ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi demikian terjadi hampir merata di seluruh kelompok masyarakat, baik kelompok ekonomi bawah maupun menengah ke atas. Berita baiknya, juga terjadi penurunan proporsi konsumsi rokok dan tembakau hingga 1,25 persen dan peningkatan proporsi konsumsi masyarakat beralih ke komoditas buah-buahan.

**Tabel 6.3. Konsumsi Kalori dan Protein Perkapita Perhari Menurut Kelompok Pengeluaran Perkapita Sebulan, 2019**

Kelompok Pengeluaran	Energi (kkal)	Protein (gram)
(1)	(2)	(3)
40 persen terbawah	1 750,27	49,48
40 persen tengah	2 105,09	62,31
20 persen teratas	2 672,80	82,78
<b>Rata-rata Konsumsi Perkapita</b>	<b>2 077,73</b>	<b>61,31</b>

Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Sementara itu, rata-rata konsumsi protein perkapita penduduk tahun 2019 mencapai 61,31 gram. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, konsumsi protein penduduk sudah memenuhi kecukupan protein yang disyaratkan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi yaitu 57 gram.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk maka semakin baik pula kualitas gizi makanan yang dikonsumsi. Apabila diamati terkait ketercukupan kalori dan protein menurut kelompok pengeluaran perkapita perhari, kelompok masyarakat menengah ke bawah yang umumnya belum memenuhi kebutuhan minimal konsumsi energi yang semestinya. Sedangkan untuk kebutuhan protein, yang masih belum memenuhi adalah pada kelompok masyarakat ekonomi bawah. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk golongan ini masih belum menjadikan kebutuhan asupan kalori dan protein sebagai prioritas bagi anggota keluarganya.

# SOSIAL LAINNYA

PENGGUNA TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

74,80 %

(USIA 5 TAHUN KE ATAS)

7



PENGGUNA YANG  
MENGAKSES INTERNET

35,60 %



## Konsep dan Definisi

- **Teknologi Informasi dan Komunikasi** dalam bahasan ini mencakup *smartphone*, komputer *desktop*, *laptop (portable)*, atau *tablet* (atau komputer genggam yang serupa).
- **Beras Sejahtera (rastra/raskin)** adalah program bantuan dari pemerintah untuk keluarga miskin berupa pendistribusian beras khusus kepada keluarga miskin yang harganya telah di subsidi oleh pemerintah.
- **Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)** adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan BLSM di tahun 2015.
- **Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)** adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. KPM akan menerima kit bantuan non tunai berupa kupon elektronik (e-voucher) dari Bank Penyalur. Besaran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp.110.000,- per KPM per bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi. KPM dapat menggunakan e-voucher tersebut untuk membeli beras serta bahan pangan lainnya seperti telur, sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan di e-waroeng.
- **Program Indonesia Pintar (PIP)** melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin,

rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

- **Program Keluarga Harapan (PKH)** merupakan upaya memberi perlindungan sosial bagi Keluarga Miskin (KM). Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga Miskin (KM) berdasarkan Basis Data Terpadu. Peserta PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban peserta PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sementara itu, kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Khusus anggota keluarga peserta PKH penyandang disabilitas, kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya.

Aspek sosial lain seperti akses pada teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi indikator ukur kesejahteraan masyarakat. Perkembangan gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang diperoleh melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar dan komputer. Jenis akses dan media informasi yang beragam tentunya menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mengikuti tren gaya hidup modern. Semakin terjangkaunya harga telepon pintar dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan internet, semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi yang mereka inginkan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti program perlindungan sosial, serta kepemilikan aset/barang berharga oleh masyarakat. Semakin merata penyaluran program perlindungan sosial, semakin mempermudah masyarakat kelompok menengah kebawah untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dan dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

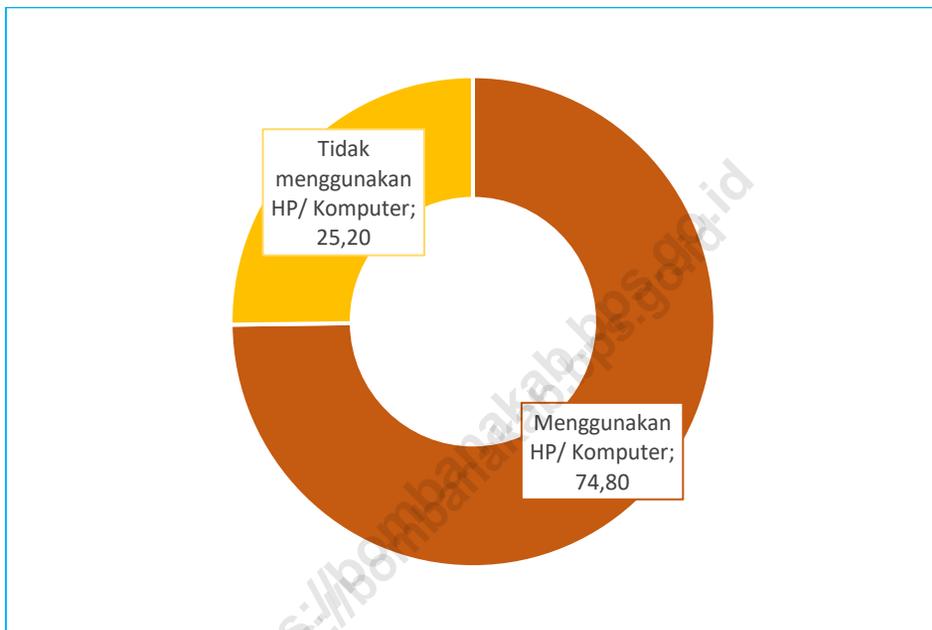
## 7.1 Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan telepon seluler yang semakin canggih dan mudah didapat cenderung berdampak kepada menurunnya kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon rumah. Masyarakat kini cenderung memilih telepon seluler karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana-mana, lebih bersifat pribadi, dan tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dsb.

Pada tahun 2019 penggunaan telepon seluler (HP) dan/atau komputer oleh penduduk berusia lima tahun ke atas mencapai 74,80 persen. Artinya, pada tahun 2019, setiap 100 orang usia lima tahun ke atas, 75 diantaranya sudah menggunakan HP dan/atau komputer. Angka ini meningkat terus setiap tahunnya. Pada tahun 2018, penggunaan HP hanya 68,68 persen. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Mengingat kebutuhan akan informasi dan komunikasi

serta pemenuhan kebutuhan gaya hidup masyarakat yang mulai meluas hingga ke dunia maya.

**Gambar 7.1. Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun ke Atas Menurut Penggunaan Teknologi Informasi, 2019**



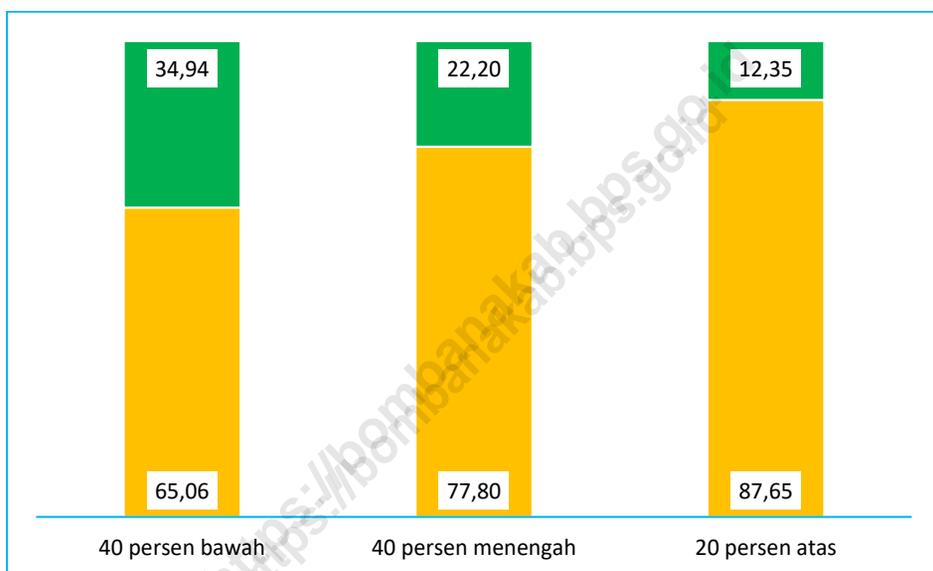
Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Kita juga bisa melihat bagaimana pola penggunaan HP dan/atau komputer ini pada masing-masing kelompok ekonomi masyarakat. Penggunaan teknologi informasi ini masih erat korelasinya dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Jelas saja dikarenakan untuk kepemilikannya pun membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pada kelompok masyarakat ekonomi bawah masih ada 35 dari setiap 100 orang di kelompoknya yang tidak pernah mengakses teknologi informasi selama tiga bulan terakhir. Sedangkan pada kelompok ekonomi masyarakat ekonomi teratas, hanya 12 dari setiap 100 orang usia lima tahun ke atas di kelompoknya yang tidak mengakses HP dan/atau komputer selama tiga bulan terakhir.

Namun ada fenomena yang cukup menarik ketika memperhatikan lebih jauh lagi grafik yang tersaji pada gambar 7.2. Meskipun taraf ekonomi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akses teknologi informasi,

kelompok masyarakat ekonomi bawah yang sudah menjangkau akses terhadap HP dan/atau komputer mencapai angka 65 persen. Artinya, dapat dikatakan bahwa akses terhadap teknologi ini sudah hampir menjadi kebutuhan bagi semua kalangan.

**Gambar 7.2. Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun ke Atas Menurut Kelompok Pengeluaran dan Penggunaan Teknologi Informasi, 2019**

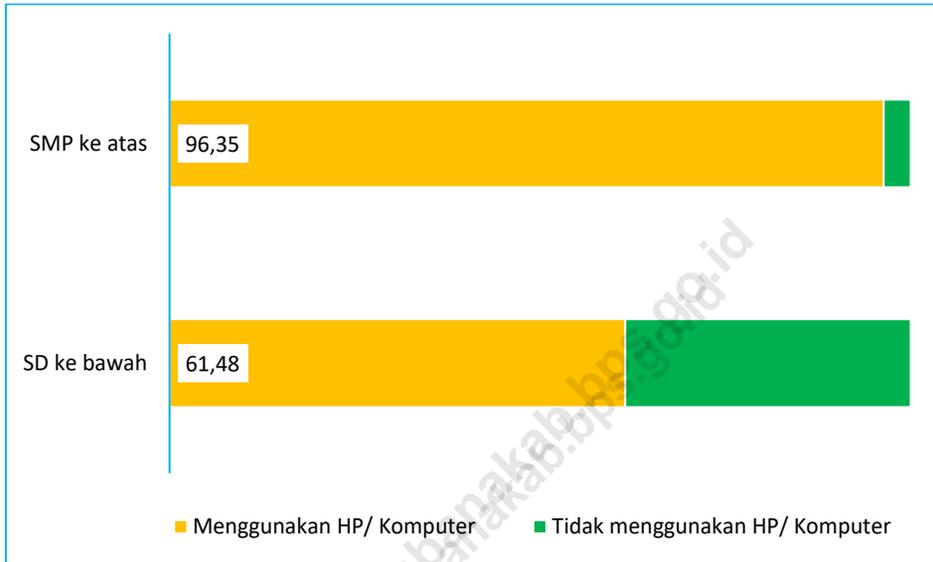


Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Pola tersebut tidak berbeda ketika diamati berdasarkan karakteristik jenis kelamin masyarakat. Baik laki-laki maupun perempuan, persentase pengguna HP dan/atau komputer hampir sama. Pada gambar 7.3 terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan ketika penduduk dikelompokkan berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Untuk masyarakat usia lima tahun ke atas yang belum menyelesaikan pendidikan SD, atau yang tidak pernah bersekolah, atau yang pernah sekolah namun tidak menamatkan jenjang SD, sejumlah 61,48 persen diantaranya sudah memperoleh akses teknologi informasi melalui HP dan/atau komputer.

Sedangkan pada kelompok masyarakat yang pendidikan terakhirnya SMP ke atas, setidaknya 96 dari setiap 100 orang sudah mendapatkan akses terhadap teknologi informasi, baik melalui HP maupun komputer.

**Gambar 7.3. Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Penggunaan Teknologi Informasi, 2019**



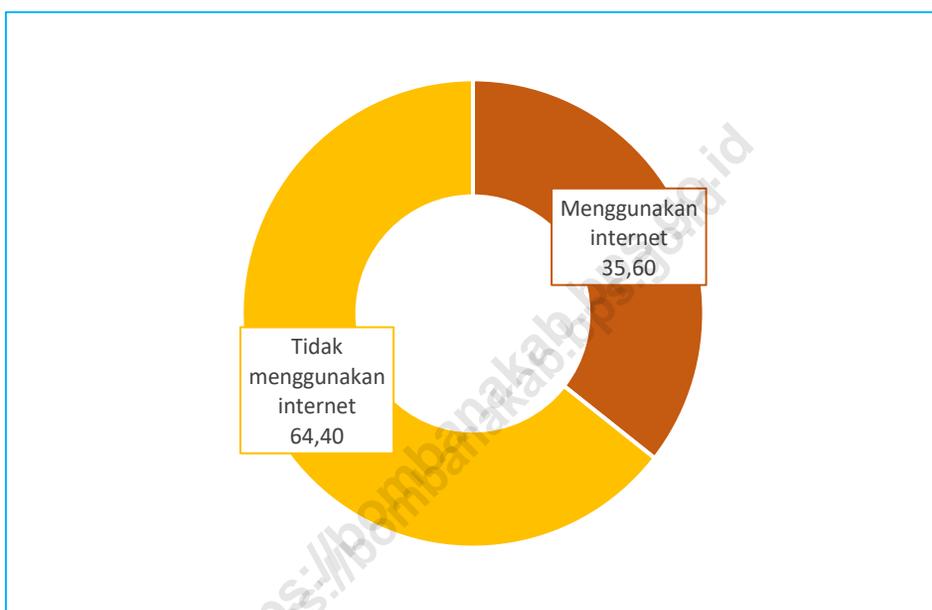
Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Sarana Teknologi informasi dan komunikasi lainnya adalah internet. Sama halnya dengan penggunaan telepon genggam, pemanfaatan akses internet juga meningkat tajam dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2017, hanya 11,90 persen penduduk yang menggunakan/memanfaatkan akses internet. Persentase ini meningkat menjadi 23,55 persen pada tahun 2018 persen dan menjadi 35,60 persen pada tahun 2019.

Fakta ini tidak mengherankan, perkembangan dan perluasan jaringan internet semakin gencar dilakukan. Ditambah lagi dengan peluncuran proyek palapa ring oleh pemerintah sejak tahun lalu, yang akan terus meningkatkan jangkauan jaringan internet hingga menjangkau seluruh nusantara. Proyek infrastruktur komunikasi dan informatika yang dikenal juga dengan istilah 'tol langit' ini akan menjadi proyek akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi melalui ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi berkapasitas besar yang terpadu. Selain itu juga bisa memberikan jaminan kualitas internet dan komunikasi yang berkualitas tinggi, aman, dan murah. Hal ini berarti,

ketika pengerjaan proyek ini sudah sampai ke pulau Sulawesi, sedikit banyaknya tentu akan ada dampak kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bombana.

**Gambar 7.4. Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun ke Atas Menurut Akses Internet dalam Tiga Bulan Terakhir (persen), 2019**



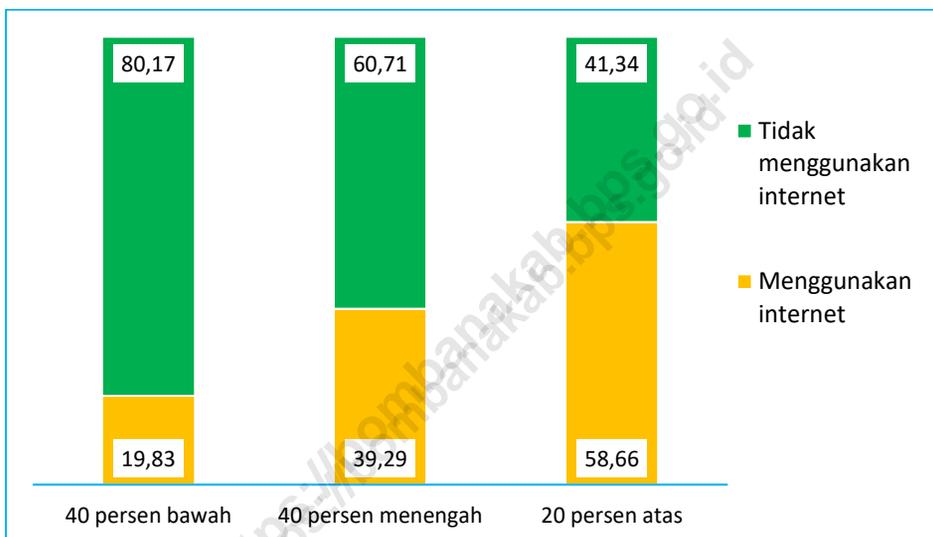
Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Pada gambar 7.5 disajikan pola penggunaan akses internet oleh penduduk usia lima tahun ke atas yang dikelompokkan menurut tingkatan ekonomi masyarakat. Terlihat berbeda dengan data penggunaan/akses teknologi informasi pada masyarakat ekonomi bawah yang sudah mencapai 65,06 persen, namun yang menggunakan internet hanya 19,83 persen. Artinya, dari setiap 100 orang penduduk usia lima tahun ke atas di kelompok masyarakat ekonomi bawah, baru 20 orang saja yang mengakses internet di kesehariannya.

Gambar tersebut menunjukkan kondisi akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat berdasarkan kelompok pengeluarannya (kemampuan ekonominya). dari grafik tersebut terlihat pola yang jelas bahwa, semakin tinggi status ekonomi sekelompok masyarakat, kecenderungannya untuk menggunakan/akses terhadap internet juga semakin tinggi. Kelompok masyarakat yang sangat sedikit

persentasenya dalam penggunaan internet adalah kelompok masyarakat ekonomi bawah. Pada kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas, secara berturut-turut, pengguna akses internet yaitu 39,29 persen dan 58,66 persen dari total masyarakat di kelompoknya masing-masing.

**Gambar 7.5. Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun ke Atas Menurut Kelompok Pengeluaran dan Akses Internet dalam Tiga Bulan Terakhir (persen), 2019**



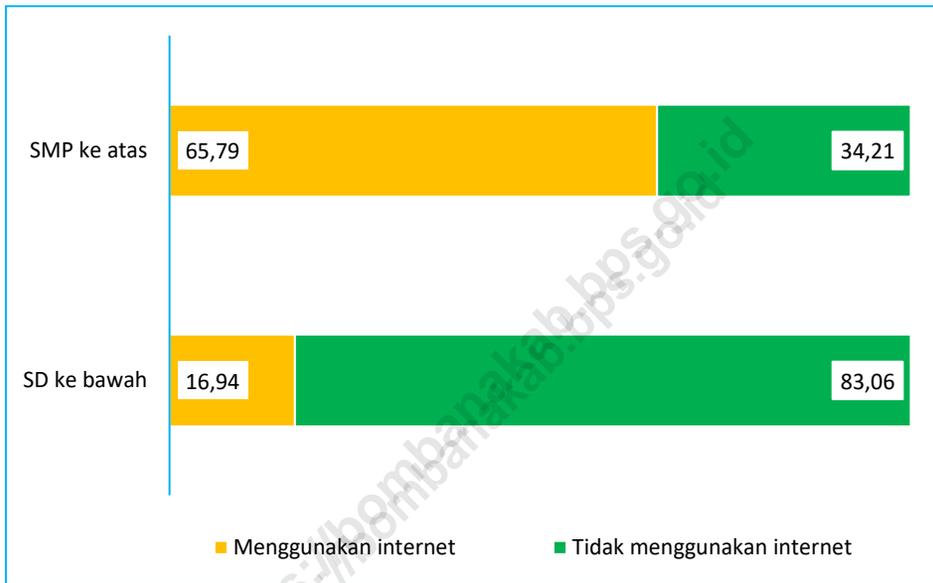
Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Selain itu, dapat juga kita amati karakteristik penggunaan internet oleh masyarakat, dilihat dari kelompok masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkannya. Dari grafik yang disajikan pada gambar 7.6 terlihat perbedaan yang signifikan antara kelompok masyarakat dengan pendidikan tertinggi SD ke bawah dan pendidikan tertinggi SMP ke atas. Hanya 16,94 persen penduduk usia lima tahun ke atas yang berpendidikan tertinggi SD atau tidak tamat SD yang mengakses internet. Data ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup pesat di tengah masyarakat dalam hal akses internet, pada tahun 2018 hanya 7,55 persen saja pengguna internet di kelompok ini.

Pada kelompok masyarakat dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SMP ke atas, lebih dari separuhnya sudah tersentuh dengan dunia internet, yaitu mencapai 65,79 persen. Dengan kata lain, dari setiap

100 orang masyarakat dengan pendidikan tertinggi SMP ke atas, 66 orang diantaranya mengakses internet selama tiga bulan terakhir.

**Gambar 7.6. Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir Akses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir (persen), 2019**



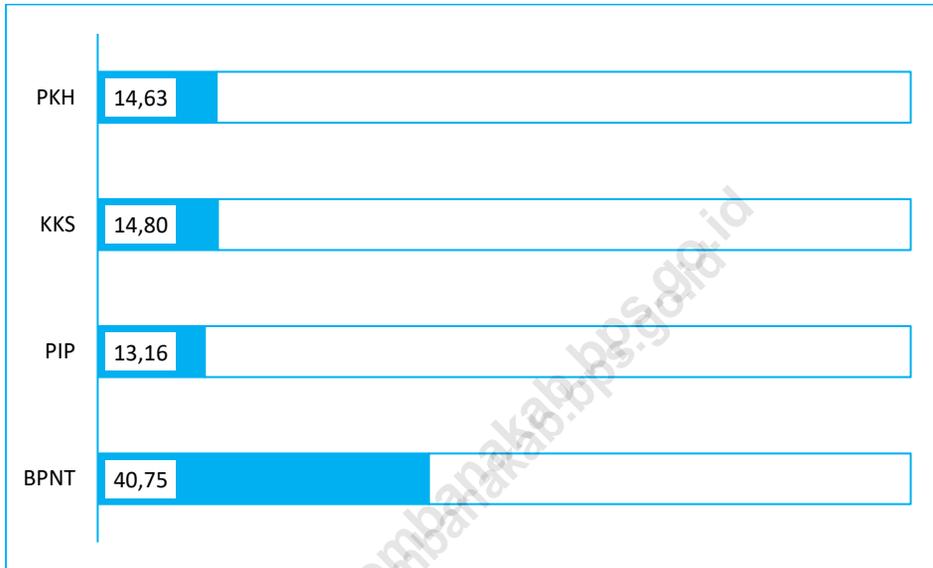
Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

## 7.2 Program Perlindungan Sosial

Pemerintah dalam melaksanakan program-programnya banyak memberikan fasilitas untuk rakyat miskin guna meringankan beban rumah tangga miskin, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Beras Miskin (Raskin)/ Beras Sejahtera (Rastra).

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019 menunjukkan bahwa, terdapat sekitar 14,63 persen rumah tangga yang menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk program Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terdapat 14,80 persen. Sedangkan Program Indonesia Pintar (PIP) diterima oleh 13,16 persen dari total rumah tangga.

**Gambar 7.7. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima, 2019**



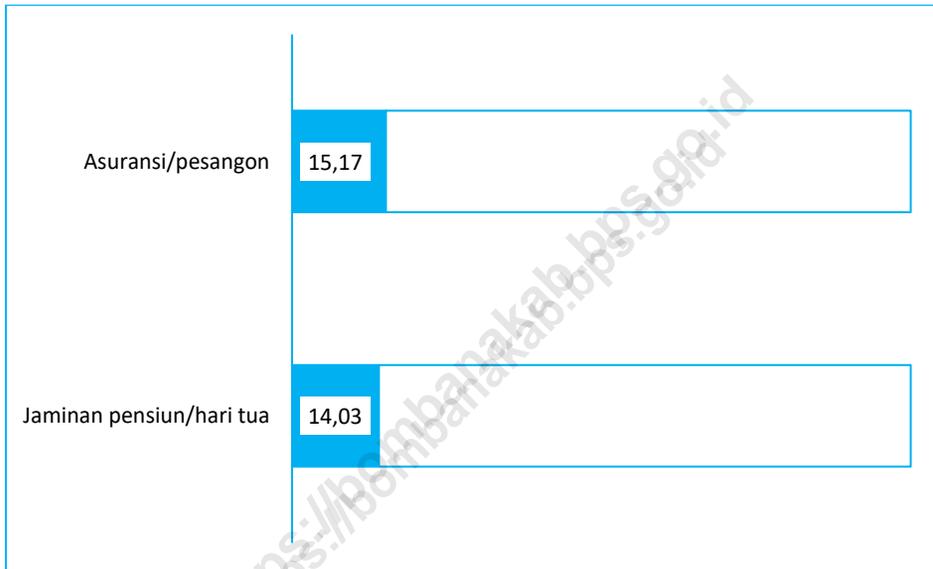
Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog/Dolog) melaksanakan program pengadaan beras murah atau beras sejahtera (rastra) yang ditujukan bagi masyarakat miskin agar tercukupi kebutuhan pangannya. Selain berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, program raskin juga berguna untuk mengendalikan inflasi melalui intervensi pemerintah, dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar 0 rupiah, dan menjaga stok pangan nasional. Pemerataan untuk program raskin/rastra diterapkan oleh pemerintah daerah kepada seluruh rumah tangga yang membutuhkan. Pada tahun 2019, sebanyak 40,75 persen rumah tangga menerima bantuan berupa beras sejahtera (dengan pemerataan) dengan biaya 0 rupiah.

Selain program perlindungan sosial di atas, program perlindungan sosial lainnya yang diterima masyarakat baik dari pemerintah/ BUMN/ swasta yaitu jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, asuransi kematian, dan pemberian pesangon saat ada Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK). Gambar 7.8 menjelaskan bahwa, pada tahun 2019 sebanyak 15,17 persen rumah tangga memiliki asuransi seperti asuransi kecelakaan kerja/ asuransi kematian/pesangon saat PHK. Sedangkan untuk jaminan pensiun/hari tua dimiliki oleh 14,03 persen rumah tangga.

**Gambar 7.8. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima, 2019**



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

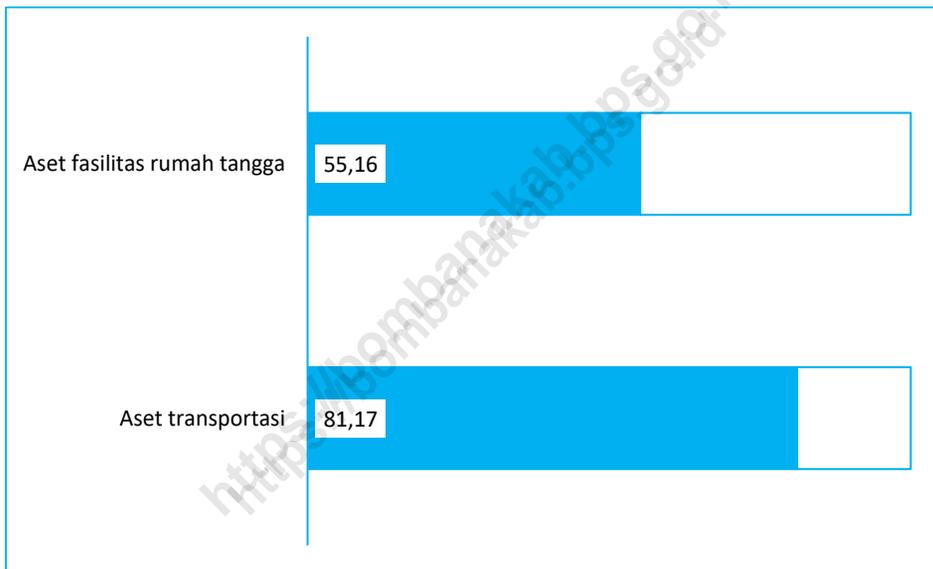
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada peningkatan masyarakat penerima manfaat di kedua jenis program perlindungan di atas. Untuk jaminan berupa asuransi/pesangon, sebelumnya hanya dimiliki oleh 7,90 persen masyarakat dan pada 2019 meningkat menjadi 15,17 persen. Demikian juga pada jenis jaminan pensiun/hari tua yang sebelumnya hanya dimiliki oleh 10,59 persen masyarakat, kini menjadi 14,03 persen.

### 7.3 Kepemilikan Aset Oleh Rumah Tangga

Kepemilikan aset menjadi profil yang dapat menggambarkan kualitas kehidupan masyarakat. Karena pada umumnya, kepemilikan berbagai jenis aset diperoleh masyarakat setelah mereka mampu/merasa akan mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya berupa sandang, pangan, dan papan.

Aset fasilitas rumah tangga yang dicakup dalam survei ini meliputi lemari es/kulkas, Air Conditioner (AC), Pemanas air/Heater (bukan dispenser), televisi layar datar minimal 30 inci, tabung gas 12 kg, dan telepon rumah. Dari gambar 7.9 terlihat bahwa, untuk kepemilikan aset fasilitas rumah tangga, dari setiap 100 rumah tangga, setidaknya 55 rumah tangga di antaranya memiliki minimal satu jenis aset fasilitas rumah tangga sebagaimana dirincikan sebelumnya.

**Gambar 7.9. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset Menurut Jenis Aset, 2019**



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Sedangkan yang dimaksud aset transportasi yang dimiliki rumah tangga disini yaitu meliputi sepeda motor, perahu, perahu motor, dan mobil. 81,17 persen rumah tangga di Bombana mempunyai minimal satu jenis aset transportasi.

# DAFTAR PUSTAKA





## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2019. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2019*. BPS: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Pedoman Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas Maret 2019)*. BPS: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana. 2019. *Kabupaten Bombana Dalam Angka 2019*. BPS Kabupaten Bombana: Rumbia.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana. 2019. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019*. BPS Kabupaten Bombana: Rumbia.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. 2019. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara 2019*. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara: Kendari.

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

MUNAJAH



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BOMBANA**

Jl. Poros Kendari No.85 Kelurahan Lameroro Kecamatan Rumbia  
Homepage: <https://bombanakab.bps.go.id>; Email: [bps7406@bps.go.id](mailto:bps7406@bps.go.id)

ISBN 978-623-93817-8-3



9 786239 381783